

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 29 November 1923, Mustafa Kemal Pasya terpilih menjadi presiden pertama di Turki yang kemudian menjadikan Turki sebagai Republik Turki modern dengan sistem Sekularisme. Rezim Mustafa Kemal Pasya membawa sejumlah perubahan, yaitu Turki yang semula berbentuk kekhalifahan kini seutuhnya berbentuk sekuler.

Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, intervensi militer sangat kuat dalam pemerintahan sehingga telah terjadi 4 kali kudeta militer dengan alasan menyelamatkan dan mempertahankan sekularisme Turki. Langkah tersebut juga dikarenakan demi memperlancar upaya integrasi Turki menuju keanggotaan Uni Eropa.

Kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu 2007 di Turki adalah suatu peristiwa yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Mengingat Abdullah Gul adalah seorang Muslim yang taat dan berasal dari Partai Keadilan Pembangunan yang berbasis Islam. Berbagai kontroversi terjadi dan kecaman dari pihak Pro Sekuler dan militer berdatangan. Kecaman itu merupakan bentuk kekhawatiran Pro Sekuler dan Militer akan berubahnya sistem Sekuler menjadi berbentuk Islam. Oleh karena itu Penulis menetapkan Faktor- Faktor Kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu 2007 di Turki sebagai judul penelitian ini.

Negara Turki adalah negara di dua benua. Dengan luas wilayah sekitar 814.578 kilometer persegi, 97% (790.200 km persegi) wilayahnya terletak di benua Asia dan sisanya sekitar 3% (24.378 km persegi) terletak di benua Eropa. Posisi geografi yang strategis itu menjadikan Turki jembatan antara Timur dan Barat. Bangsa Turki diperkirakan berasal dari Asia Tengah. Secara historis, bangsa Turki mewarisi peradaban Romawi di Anatolia, peradaban Islam, Arab dan Persia sebagai warisan dari Imperium Usmani dan pengaruh negara-negara Barat Modern. Hingga saat ini bangunan-bangunan bersejarah masa Bizantium masih banyak ditemukan di Istanbul dan kota-kota lainnya di Turki.¹

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.

¹ *Demokrasi tanpa sekularisme*, Agustus 2007, di akses pada hari Rabu, 5 September 2007 pukul 20:15 WIB, melalui <http://www.maftuhin.net/2007/08/demokrasi-tanpa-sekularisme.html>.

Turki juga merupakan salah satu negara yang memiliki populasi Muslim terbesar di Kawasan Eurasia dan memiliki sejarah panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pemerintahan Islam. Sekitar pertengahan abad ke-13, Turki masih berupa kabilah kecil yang dipimpin oleh Erthogul. Sampai kemudian, seiring jatuhnya Kesultanan Seljuk oleh Mongol, kabilah kecil itu dapat memanfaatkan peluang untuk menggantikan posisi khalifah dibawah Kesultanan Usmaniyah. Selanjutnya kabilah kecil yang sudah menjadi khalifah itu terus menerus memperoleh kemenangan dan memperluas wilayahnya. Kekuasaan khalifah Usmaniyah yang berpusat di Istambul menyebar hingga ke kawasan Balkan, Hongaria, Austria, Ceko, Slovakia dan beberapa negara di kawasan bekas Uni Soviet. Beberapa negara Islam seperti Mesir, Suriah, Irak, Palestina, Jordania, Mekkah, Madinah dan seterusnya juga berada di bawah naungannya. Sampai periode abad ke-18, kejayaan kekhalifahan itu berangsur-angsur memudar. Kejatuhan khalifah Islam itu sendiri tidak lepas dari usaha-usaha konspirasi Barat atau Eropa. Berbagai cara dilakukan oleh Barat untuk menghancurkan kekhalifahan, termasuk salah satunya adalah kehadiran Mustafa Kemal Pasya, agen Inggris keturunan Yahudi Dunamah dari Salonika sebagai pahlawan Turki. Pada tanggal 29 November 1923, Mustafa Kemal Pasya dipilih menjadi Presiden Pertama Turki. Dan menjadikan Turki sebagai Republik Turki modern dengan sistem sekuler dan paham demokrasi.²

Sejak Turki dibawah Rezim Mustafa Kemal pasya, negeri itu mulai tercabik-cabik. Bahkan yang lebih buruk lagi, semua sendi-sendi bangunan Islam

² Myrna Ratna, "Demokrasi dan Sekularisme Turki," *Kompas*, 26 September 2004, hal.10.

juga ia hancurkan. Ia menghapus khalifah sebagai penguasa spiritual politik yang tertinggi yang berkuasa selama berabad-abad di kesultanan Turki. Segala simbol-simbol kekhalifahan hanya terbatas pada hal-hal yang bersifat seremonial dan keagamaan saja. Begitupun juga pengadilan syariat, aliran keagamaan muslim dibubarkan dengan paksa, tempat-tempat makam suci ditutup, undang-undang sipil diganti undang-undang Swiss, Adzan diganti bahasa Turki. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kiblat ekonomi dan politik Turki secara drastis yang lebih berorientasi pada sistem sekuler.³ Sejak pasca diproklamasikannya Republik Turki modern, terjadi perubahan yang signifikan terhadap berbagai kebijakan politik. Nilai-nilai religius ditanggalkan dan diganti dengan nilai-nilai yang lebih berorientasi sekuler (Barat). Tujuan utama dari pembaharuan Turki adalah memisahkan Turki dari budaya dan tradisi kuno Arab Asia serta mengubahnya menjadi bangsa modern gaya Barat. Langkah tersebut dilakukan demi memperlancar upaya integrasi Turki dalam organisasi negara Barat dan yang menjadi prioritas utama yaitu keanggotaan Turki dalam Uni Eropa.

Setelah Mustafa Kemal berkuasa, pemerintahan Turki dilanjutkan oleh suatu pemerintahan partai tunggal di bawah Partai Rakyat Republik atau Cumhuriyeti Halk Partisi Republican People's Party (CHP). Walaupun tidak lagi dilibatkan secara formal, militer memainkan perannya untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan sekularisme radikal untuk merealisasikan ide-ide kemalisme tradisi islam warisan kesultanan Ustmani di tekan dengan dalih untuk

³ Suwiryadi., *Mustafa Kemal Pasya Pembina Turki Baru*, (Jakarta dan Amsterdam: Penerbit Djambatan, 1950).

mempercepat proses modernisasi. Tindakan pemerintah itu bahkan telah menyentuh sisi religius dari masyarakat Islam. Hal itu terlihat misalnya dalam upaya pemerintah untuk mengganti bahasa Arab dalam praktek-praktek ibadah umat islam dengan bahasa Turki.⁴

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi dan ingin menjadi bagian negara Barat yang dalam artian sekuler, Turki berusaha membuktikan bahwa negara Turki adalah negara yang demokratis dan mampu menjadi anggota Uni Eropa. Dalam pelaksanaan demokratisasinya Turki telah mengalami pasang surut.. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, setidaknya telah terjadi empat kali kudeta militer dengan alasan menyelamatkan, dan mempertahankan nilai-nilai sekularisme Turki. Kudeta terakhir terjadi pada tahun 1997, saat pemilu Turki dimenangkan oleh Partai Refah yang berafiliasi terhadap Islam. Pada akhirnya, mahkamah konstitusi membubarkan Partai Refah dan melarang aktivitas politik pimpinannya, yaitu Perdana Menteri Necmettin Erbakan. Keputusan ini didesak oleh pihak sekuler dan militer yang memaksa Perdana Menteri Necmettin Erbakan untuk meletakkan jabatannya.⁵

Di tengah perpolitikan Turki yang memperjuangkan paham demokrasi dan sekularismenya, Turki mengalami krisis politik, yaitu berbenturannya dua kelompok yang berseberangan dan saling berdemonstrasi. Di satu pihak kelompok pendukung sekularisme, dan di pihak lain adalah kelompok pro partai islam. Krisis politik ini terjadi menyusul terpilihnya Abdullah Gul dari partai berbasis Islam, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pada pemilihan presiden Turki

⁴ H. A. Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994).

⁵ *Kudeta militer Turki*, diakses pada hari Rabu , 5 September 2007 pukul 20:30 WIB, melalui <http://www.freedominstitute.org/id/index.php?page=profil&detail=artikel&detail=dir&id=208>.

yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 27 April 2007. Kubu sekuler menganggap sidang pemilihan presiden putaran pertama tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, yakni 2/3 anggota parlemen atau sekitar 367 dari 550 orang.⁶

Pemilihan presiden melalui pemilu parlemen dan berlangsung dalam tiga putaran. Jika dalam pemilihan putaran pertama seorang calon presiden mendapat 2/3 suara maka dia terpilih menjadi presiden. Namun jika tidak, pemilihan putaran kedua harus dilakukan. Syarat terpilihnya presiden sama dengan putaran pertama. Jika parlemen tidak berhasil memilih presiden pada putaran kedua, pemilihan dilanjutkan pada putaran ketiga. Calon presiden dapat terpilih jika mendapatkan setidaknya 276 suara. Tidak kuorum-nya sidang tidak lain karena pemboikotan yang dilakukan oleh kelompok oposisi prosekularisme. Kelompok ini sejak semula curiga bahwa calon presiden dari AKP akan memperjuangkan sistem politik berbasis Islam, menggeser sekularisme yang sudah menjadi ideologi Turki sejak dicanangkan oleh Mustafa Kemal Attartuk tahun 1923. Sebenarnya calon presiden yang diajukan AKP adalah PM Recep Tayyib Erdogan. Karena mendapat pertentangan keras, maka akhirnya AKP mengusung Menteri luar Negeri Abdullah Gul. Namun yang terakhir inipun tetap dianggap akan membawa pengaruh Islam di negara sekuler Turki.

Background Gul yang muslim membuat parlemen sangsi Gul dapat bersifat nasionalis. Ketakutan kelompok sekuler mempengaruhi para anggota parlemen yang pada akhirnya menyebabkan Gul sulit untuk diterima oleh anggota

⁶ *Dilema Demokrasi Turki Islam atau Sekularisme*, diakses pada hari Rabu, 5 September 2007 pukul 21:05 WIB, melalui <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/periskop/dilema-demokrasi-turki-islam-atau-sekuler.html>.

parlemen. Nampak dari tantangan yang ada membuat Gul hampir mengalami kekalahan dengan adanya pemilihan yang dilakukan secara berulang-ulang, sulit untuk menemukan kesepakatan dalam parlemen. Peluang Gul untuk memenangkan pemilu 2007, rendah karena banyak masyarakat Turki yang menganggap apabila kepemimpinan Turki dikuasai oleh seseorang yang berlatar belakang muslim, tentu akan membawa Turki pada muslimisasi.

Penentang tidak saja datang dari partai oposisi, Partai Rakyat Republik (CHP), partai yang mengusung sekularisme, melainkan juga dari militer. Panglima tertinggi militer Turki Yassar Buyukanit menyampaikan pernyataan bahwa mereka dapat mengintervensi jika proses pemilu mengancam diabaikannya sekularisme Turki.

Atas tuntutan Partai rakyat Republik (CHP), akhirnya hasil pemilihan presiden putaran pertama dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi (PK). Sebenarnya, jika pemilihan putaran pertama tidak oleh keputusan Pengadilan Konstitusi, dapat dilakukan pemilihan putaran kedua, jika pun tetap gagal mencapai kuorum karena tetap diboikot oleh CHP, Sebagai konsekuensi dari keputusan PK, maka diadakan pemilihan ulang putaran pertama pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007. Pemilihan inipun akhirnya gagal juga mencapai kuorum, karena kembali diboikot pihak oposisi. Maka sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mempercepat pemilu legislatif yang seharusnya dilaksanakan pada November 2007 menjadi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2007. Sekitar 42 juta orang berhak memberikan suara pada pemilu dimana 14 partai berusaha memenangkan kursi pada parlemen yang beranggotakan 550 orang. Sehingga melalui hasil suara

diperoleh suara terbanyak oleh partai yang berbasis islam yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang mencalonkan Abdullah Gul menjadi Presiden. AKP memperoleh 48 % suara secara nasional atau 339 suara dari 550 anggota di parlemen. Sedangkan dua dari partai sekuler yang meraih suara terbanyak diantaranya yaitu Partai Rakyat Republik (CHP) mendapatkan 21% berada pada posisi kedua, dan Partai Gerakan Nasional (MHP) dengan 14% suara. Selain itu, 20 kandidat dari kalangan independen juga mendapatkan kursi di parlemen, termasuk politisi pro-Kurdi.⁷

Pada tanggal 28 agustus 2007, Abdullah Gul dilantik menjadi Presiden baru di Turki, menggantikan Presiden Ahmet Necdet Sezer. Berbagai kontroversi dari pihak pro sekuler dan militer sudah timbul dari awal pencalonan Abdullah Gul menjadi Presiden oleh Perdana Menteri Recep Tayyib Erdogan. Mereka khawatir Gul dan Erdogan mempunyai agenda Islam tersembunyi yang akan membahayakan dan mengganti konstitusi sekuler di Negeri itu karena Gul beraliran konservatif. Terlebih istri Gul, Hayrunnisa menggunakan jilbab, yang berdasarkan undang-undang dilarang dikenakan di kantor pemerintahan dan sekolah.

⁷ Hasil Sementara Pemilu Turki, 02 September 2007, diakses pada hari Jumat, 7 September 2007 pukul 12:35 WIB, melalui http://www.hmetro.com.my/Current_News/myMetro/Sunday/Ekspresi/20070902122425/Article/indexv_html.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam pemilu 2007 di Turki?

C. Kerangka Pemikiran

Sebagai kerangka berfikir, penulis akan menggunakan kerangka berpikir Sistem Parlemerter dan Teori Basis Partai dari Angus Campbell dan Konsep Demokrasi untuk menjelaskan permasalahan yang ada dalam sub-bab Rumusan masalah. Teori tersebut diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam pemilu 2007 di Turki.

1. Sistem Parlemerter

Zulkifli Hamid menjelaskan bahwa parlemen merupakan pusat segala kegiatan politik di negara. Di lembaga inilah semua keputusan yang menyentuh kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan kenegaraan dibuat. Dalam parlemen, anggota-anggota terpilih dari partai-partai politik utama mendiskusikan, dan sekaligus berdebat tentang semua aturan yang mengikat anggota-anggota masyarakat.

Segala tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan administrasi negara serta masalah-masalah yang menjadi kepentingan public menjadi bahan diskusi dalam parlemen. Fungsi-fungsi parlemen adalah sebagai berikut:⁸

⁸ Zulkifli Hamid. *Sistem Politik Australia*. (Bandung: Rosdakarya). Hal.52-63.

1. Fungsi membentuk dan membubarkan pemerintah

Parlemen memiliki hak untuk melakukan pemilu yang akan menentukan presiden terpilih dan selanjutnya presiden akan memimpin sesuai dengan masa jabatannya.

2. Fungsi legislasi

Fungsi legislasi atau membuat undang-undang adalah fungsi utama dan terpenting bagi parlemen. Semua rancangan undang-undang atau RUU yang akan diberlakukan harus disahkan oleh parlemen.

3. Fungsi kontrol

Fungsi ini bertujuan untuk mengontrol dan mengkritik segala tindakan pemerintah yang dipandang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sudah menjadi sifatnya bahwa parlemen terutama anggota oposisi harus selalu kritis terhadap segala tingkah laku pemerintah.

4. Fungsi penyelidikan

Fungsi ini sebenarnya merupakan bagian dari fungsi kontrol yang biasanya dilakukan oleh berbagai komisi parlemen. Fungsi penyelidikan yang terpenting biasanya dilakukan terhadap keuangan pemerintah.

5. Fungsi perwakilan

Salah satu hal yang paling fundamental dan tugas terpenting bagi parlemen adalah fungsi perwakilannya. Seorang anggota parlemen dipilih untuk mewakili daerah pemilihannya. Hal tersebut menyebabkan anggota parlemen harus peka terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat di daerah

pemilihannya, dan harus bertindak atas nama rakyat di daerah pemilihannya dalam berbagai perdebatan di parlemen.

6. Fungsi latihan kepemimpinan

Untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil, seorang politisi harus memiliki berbagai bakat. Salah satu yang terpenting adalah kemampuannya mengatasi perdebatan-perdebatan sengit di parlemen. Parlemen merupakan ujian bagi para individu untuk menjadi pemimpin.

7. Fungsi memberikan informasi dan publikasi

Parlemen menyediakan kepada pemerintah, tempat untuk menjelaskan dan membenarkan apa-apa yang dilakukannya melalui berbagai perdebatan dan pernyataan menteri-menteri melalui jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan dan melalui hampir seluruh kegiatan parlemen. Oposisi juga berpeluang menyebarluaskan keluhan-keluhannya terhadap pemerintahan, untuk membayangi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap persoalan bangsa.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap

jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.⁹

Presiden memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan di Turki. Apa yang dilakukan oleh presiden harus dapat dipertanggungjawabkan oleh presiden kepada masyarakat. Parlemen akan mengontrol jalannya aktivitas pemerintahan yang dilakukan presiden. Artinya, meskipun presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan namun kewenangan tersebut bersifat terbatas karena segala aktifitasnya akan dikritisi oleh parlemen.

Di Turki, sistem yang ada adalah parlementer. Artinya, masyarakat memilih partai yang ada dan selanjutnya partai tersebut akan mengirimkan calonnya dalam parlemen. Anggota parlemen yang ada selanjutnya akan mengadakan pemilihan umum untuk menentukan individu yang akan menjabat sebagai presiden Turki dan memerintah sesuai dengan masa jabatannya.

2. Teori Basis Partai

Suatu partai mendasarkan kekuatannya pada dukungan satu atau beberapa kelompok yang mempunyai orientasi dan tujuan-tujuan politik yang sama, dengan kata lain partai berdiri di atas suatu dukungan basis sosial. Di sini basis sosial diartikan sebagai satu atau beberapa orang yang menjadi pendukung utama dari suatu partai politik. Hal tersebut mengaitkan tingkat atau kualitas kesetiaan partisipasi dan pemberian suara oleh pemilih kepada partainya dalam pemilu.

⁹ *Sistem parlementer*, diakses hari Jum'at, 21 November 2008 pukul 13:30 WIB, melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

Menurut Angus Campbell, ada tiga variable utama yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam memilih suatu partai, ketiga variable tersebut adalah sebagai berikut.¹⁰

1. Identifikasi terhadap partai

Secara psikologis, individu memilih suatu partai karena adanya rasa kesetiaan dan cintanya pada partai tersebut.

2. Isu yang sedang berkembang

Berdasar pada pertimbangan terhadap isu yang sedang berkembang, individu memilih partai yang mereka anggap layak dan sanggup untuk memimpin pemerintahan. Kelayakan dan kesanggupan suatu partai ditentukan oleh isu yang sedang berkembang saat ini.

3. Orientasi terhadap calon

Individu memilih suatu partai karena kualitas personal kandidat tanpa memandang pada partai yang mendukungnya atau pada isu yang sedang berkembang. Perilaku ini terbagi menjadi dua, pertama: kualitas instrumental di mana pemilih melihat kemampuan kandidat dalam menangani suatu masalah tertentu. Kedua: kualitas simbolis di mana pemilih mempunyai pandangan bagaimanakah seharusnya figur pemimpin yang baik.

Merujuk pada kriteria di atas, maka dapat dikemukakan beberapa faktor yang mendukung kemenangan kandidat presiden Abdullah Gul pada pemilu Turki 2007. Faktor pertama; isu yang sedang berkembang. Isu utama yang diangkat Gul adalah mengenai pengintegrasian negara Turki menuju anggota Uni Eropa yang

¹⁰ Angus Campbell, *The American Voters*, (New York: John Wiley and Sons, 1960).

diyakini akan membawa kemajuan dan masa depan yang lebih baik.¹¹ Hal tersebut telah menjadi konsumsi politik yang selalu menarik penduduk Turki. Faktor kedua: Orientasi terhadap calon. Kebanggaan penduduk Turki mempunyai calon Presiden yang taat beragama dan mempunyai iman yang kuat. Abdullah Gul pernah menjabat sebagai menteri Luar negeri Turki dan dalam masa jabatannya dikenal sebagai pejabat yang jujur dan bertanggung jawab. Hingga pendukungnya yakin dengan terpilihnya Abdullah Gul sebagai presiden Turki maka akan membawa perubahan besar negara Turki kearah yang lebih baik dan membawa negara Turki ke pengintegrasian anggota Uni Eropa.

3. Konsep Demokrasi

Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik¹² yakni sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga negara. Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jika sarana tindakan pemaksaan dengan kekerasan di netralkan.
2. Jika negara itu memiliki suatu masyarakat majemuk yang dinamis dan modern.
3. Jika kekuasaan pemerintahan tidak hanya terpusat kepada kepala negara saja, tetapi wakil presiden atau perdana menteri tetap memiliki kekuasaan.
4. Adanya pemilu yang jujur dan adil.

¹¹ *Kemenangan AKP dan Abdullah Gul*, September 2007, diakses pada hari Jumat, 7 September 2007 pukul 13:05, melalui http://mygamis-isuantarabangsa.blogspot.com/2007/09/kemenangan-akp-dan-abdullah-gul_12.html.

¹² Robert A. Dahl, *Polyarchy : Participation and Opposition*, (New Haven: Yale University Press, 1971).

5. Jika negara itu secara budaya homogen atau heterogen, tidak terbagi-bagi dalam beberapa sub kultur yang kuat dan berbeda atau jika terbagi-bagi seperti itu, para pemimpin harus berhasil dalam menciptakan suatu tatanan.
6. Konsosiasional untuk mengatur konflik-konflik sub kultur.
7. Jika negara itu tidak mengalami intervensi dari pihak negara luar yang anti demokrasi.

Bila dilihat dari dari beberapa faktor diatas maka nampaknya negara Turki sudah dapat dikategorikan ke dalam bentuk negara yang demokrasi karena sudah memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan Dahl tersebut. Ini dapat dilihat dimana adanya pemilu yang adil dan demokratis, kendali pemerintahan yang kuat hingga tercipta tatanan pemerintahan yang solid dan kuat.

D. Hipotesis

Dari permasalahan di atas dan didukung oleh landasan teoritik yang telah diterapkan, maka didapat “Kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu Turki 2007” disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Adanya kesesuaian antara isu utama yang diangkat Gul dengan keinginan masyarakat.
2. Pemilih merasa bahwa Abdullah Gul adalah figur pemimpin yang baik dan mampu membawa negara Turki ke arah yang lebih baik.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data merupakan langkah dalam metode ilmiah. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap buku, literatur, makalah, kliping koran atau majalah, jurnal ilmiah, dokumen laporan tahunan yang diterbitkan oleh suatu instansi atau badan pemerintah yang mengkaji masalah internasional dan sumber yang dianggap resmi, kemudian dianalisa, bagaimana tiap variabel berhubungan satu sama lain.

F. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan (mengeksplanasikan) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu 2007 di Turki.
2. Untuk memenuhi syarat akhir dalam menyelesaikan studi akademis dan menyelesaikan jenjang kesarjanaan S-1, pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu 2007 di Turki, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai awal pencalonan Abdullah Gul sebagai presiden Turki pada 27 April

2007 sampai bulan Agustus 2007 ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari topik. Walaupun begitu data-data sebelum tahun 2007 dan sesudahnya tahun tersebut tetap menjadi sumber data penelitian untuk melengkapi data primer yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub-sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas. Pada bab pertama, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas mengenai dinamika politik turki diawali Gambaran umum Turki yang terdiri dari Sejarah Turki mulai dari kondisi geografi Turki, Populasi Turki, Sejarah kebudayaan Islam di Turki yang terbagi dalam dua batasan, yang pertama pada masa kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani, kedua masa kemunduran Turki Utsmani. Kemudian dijelaskan pula mengenai proses pembaratan dan upaya-upaya awal untuk modernisasi, dalam Era Revolusi Turki Muda dan Turki Modern. Dijelaskan pula mengenai Sistem pemerintahan dan Sistem politik Turki.

Bab ketiga, membahas mengenai Proses Terpilihnya Abdullah Gul menjadi Presiden, diawali dengan membahas sistem pemilu di turki, dan membahas pemilu 2007 dan Kemenangan Abdullah Gul disertai dengan grafik perolehan suara dan data perolehan kursi AKP di parlemen..

Pada bab IV ini membahas mengenai AKP mencalonkan Abdullah Gul, kemudian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu. Pertama yaitu isu utama yang diangkat Gul dalam kampanyenya yaitu berkaitan dengan pengintegrasian negara Turki menuju anggota Uni Eropa, serta membahas bagaimana figur Abdullah Gul yang kharismatik yang diyakini pemilih adalah figure pemimpin yang baik, berisikan profile Abdullah Gul.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang peneliti buat untuk menutup karya tulis ini. Pada bab ini berisi tentang rangkuman dari bab-bab yang sebelumnya serta disusun dalam bentuk kesimpulan.

BAB II

DINAMIKA POLITIK TURKI

Dalam Bab II ini berisi tentang dinamika politik turki diawali Gambaran umum Turki yang terdiri dari Sejarah Turki mulai dari kondisi geografi Turki dan populasi Turki, Sejarah kebudayaan Islam di Turki yang terbagi dalam dua batasan, yang pertama pada masa kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani, kedua masa kemunduran Turki Utsmani. Kemudian dijelaskan pula mengenai proses pembaratan dan upaya-upaya awal untuk modernisasi, dalam Era Revolusi Turki Muda dan Turki Modern. Dijelaskan pula mengenai Sistem pemerintahan dan Sistem politik Turki.

A. Sejarah Turki

Ada suatu kebutuhan yang penting untuk membahas sejarah Turki sebelum melihat fenomena sosial politik negara tersebut. Hal itu berkaitan dengan eratnya kaitan sejarah Turki dengan berbagai dinamika politik yang terjadi pada masa-masa terakhir ini. Salah satu yang sangat terlihat adalah adanya pergulatan antara pendukung kemalisme yang masih terasa dalam praktek-praktek sekuler Turki dengan pendukung kembalinya peran Islam di dalamnya. Pergulatan antara keduanya, dapat dilacak kembali kepada pemutaran sejarah Turki yang telah menempatkan Islam di luar peran-peran yang bersifat material-publik menjadi sebuah faktor spiritual-pribadi belaka.

Ketidakpuasan terhadap keterpurukan posisi Turki dalam politik Internasional oleh para pengkritik tatanan kesultanan dahulu memunculkan berbagai reaksi untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan tersebut nantinya diharapkan dapat membuat Turki mampu mempertahankan kejayaannya agar tidak tertinggal dari perkembangan peradaban di Eropa Barat. Karena Turki kini sedang berjuang untuk menjadi anggota Organisasi Internasional Uni Eropa. Turki juga merupakan negara Islam pertama yang melakukan proses pembaratan, faktor ini juga diakibatkan karena kondisi geografi Turki yang merupakan jembatan antara negara-negara Barat dan negara-negara Timur Tengah.

1. Kondisi Geografi Turki

Turki merupakan negara besar di kawasan Eurasia. Luas negara mencapai 780.580 km², dan 1,3% terdiri dari air. Wilayahnya terbentang dari Semenanjung Anatolia di Asia Barat Daya dan daerah Balkan di Eropa Tenggara. Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara, Bulgaria di sebelah barat laut, Yunani dan Laut Aegea di sebelah barat, Georgia di timur laut, Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, dan Irak dan Suriah di tenggara, dan Laut Mediterania di sebelah selatan. Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah Eropa dan Asia, sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental.¹³

Ibu kotanya berada di Ankara namun kota terpenting dan terbesar adalah Istanbul. Kawasan yang terdiri dari Turki modern telah menyaksikan kelahiran

¹³ *Turki*, diakses pada hari rabu, 3 September 2008 pukul 14:00 WIB melalui <http://id.wikipedia.org/wiki/turki>.

peradaban-peradaban utama, termasuk Kekaisaran Bizantium dan Kekhalifahan Turki Utsmani. Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya Timur dan Barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua buah peradaban. Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok dalam jalur tanah di antara Rusia dan India, Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang semakin tumbuh.

Turki adalah sebuah republik konstitusional yang demokratis, sekular, dan bersatu. Sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 di bawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk setelah kejatuhan Khilafah Ottoman, akibat Perang Dunia I. Sejak itu, Turki telah berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia Timur. Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri Persatuan Bangsa-bangsa, Organisasi Konferensi Islam (OKI), OECD, dan OSCE, serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949, dan NATO sejak tahun 1952. Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa, setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963. Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 buah ekonomi yang terbesar di dunia.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Turki dibagi menjadi 81 provinsi.¹⁵

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------|
| 1. Adana | 28. Edirne | 55. Malatya |
| 2. Adiyaman | 29. Elazığ | 56. Manisa |
| 3. Afyonkarahisar | 30. Erzincan | 57. Mardin |
| 4. Ağrı | 31. Erzurum | 58. Mersin |
| 5. Aksaray | 32. Eskişehir | 59. Muğla |
| 6. Amasya | 33. Gaziantep | 60. Muş |
| 7. Ankara | 34. Giresun | 61. Nevşehir |
| 8. Antalya | 35. Gumushane | 62. Niğde |
| 9. Ardahan | 36. Hakkari | 63. Ordu |
| 10. Artvin | 37. Provinsi Hatay | 64. Osmaniye |
| 11. Aydın | 38. Iğdır | 65. Rize |
| 12. Balıkesir | 39. Isparta | 66. Sakarya |
| 13. Bartın | 40. İstanbul | 67. Samsun |
| 14. Batman | 41. İzmir | 68. Şanlıurfa |
| 15. Bayburt | 42. Kahramanmaraş | 69. Siirt |
| 16. Bilecik | 43. Karabük | 70. Sinop |
| 17. Bingöl | 44. Karaman | 71. Şırnak |
| 18. Bitlis | 45. Kars | 72. Sivas |
| 19. Bolu | 46. Kastamonu | 73. Tekirdağ |
| 20. Burdur | 47. Kayseri | 74. Tokat |
| 21. Bursa | 48. Kilis | 75. Trabzon |
| 22. Canakkale | 49. Kırıkkale | 76. Tunceli |
| 23. Çankırı | 50. Kırklareli | 77. Uşak |
| 24. Çorum | 51. Kırşehir | 78. Van |
| 25. Denizli | 52. Kocaeli | 79. Yalova |
| 26. Diyarbakır | 53. Konya | 80. Yozgat |
| 27. Düzce | 54. Kutahya | 81. Zonguldak |

2. Populasi Turki

Pada sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk mencapai 67.844.903. Pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi 68.747.872, kepadatan penduduknya 89 jiwa/km². Mayoritas penduduk Turki adalah Muslim, dengan minoritas Kristen dan Yahudi yang signifikan tersebut adalah penganut versi Islam Sunni (Ortodoks).

¹⁵ *Ibid.*

3. Sejarah kebudayaan Islam di Turki

Turki adalah sebuah kasus yang sangat unik dalam studi politik dunia. Sejak didirikan tahun 1923, Turki menyatakan diri sebagai negara sekuler. Pilihan untuk menjadi negara sekuler ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa unik di tengah hegemoni konservatisme agama masyarakat Muslim dunia. Turki, bekas pusat pemerintahan dunia Islam, adalah satu-satunya negara berpenduduk mayoritas Islam yang menyatakan diri sebagai negara sekuler.¹⁶

Tidak hanya unik di tengah dunia Islam lain, model sekularisme Turki juga sangat berbeda dengan model sekularisme di negara-negara sekuler lain di manapun di dunia ini. Turki menerapkan sekularisme secara ketat dengan menerapkan larangan penggunaan simbol-simbol agama di ruang publik. Pada tataran yang paling ekstrem pemerintah Turki seringkali tampak sebagai rezim anti-agama.

Penerapan sekularisme Turki yang sangat ketat kemudian diperparah oleh terlibat aktifnya militer dalam pemerintahan dengan alasan untuk mengawal sekularisme. Keterlibatan militer dalam politik akhirnya membawa Turki menjadi negara sekuler-otoriter. Berkali-kali politik Turki harus berhadapan dengan arogansi militer. Selama kekuasaan kaum sekuler-otoriter, interaksi sosial seperti ekonomi, pendidikan, dan politik dikontrol secara ketat.

Dari semua kontrol yang diterapkan oleh pemerintah sekuler Turki, yang paling merasakan akibat buruknya adalah masyarakat Islami, yakni mereka yang

¹⁶ *Ber-Islam ala Turki*, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2008 pukul 17.00 WIB melalui <http://saidiman.wordpress.com/2007/>.

masih menjaga budaya Islam tradisional. Namun sekalipun secara struktural Turki dikuasai oleh rezim sekuler, tetapi masyarakat dengan ideologi Islam tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bergerak di bawah tanah menjadi kekuatan kultural yang setiap saat bisa muncul.

Satu-satunya persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Islami Turki adalah kalangan militer yang kerap kali bertindak “brutal” terhadap semua gerakan sosial yang berbau Islam. Tapi hal tersebut hanya berlangsung sampai tahun 1990-an. Berubahnya sistem ekonomi Turki, yang tadinya tertutup dan dikontrol oleh militer menjadi sedikit terbuka, membuka kesempatan bagi kalangan Islam untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi secara luas. Pemerintahan Turgot Ozal yang kemudian benar-benar mengambil kebijakan ekonomi baru bagi Turki membuat masyarakat yang awalnya tertindas secara ekonomi kemudian bangkit.¹⁷

Kelompok-kelompok sosial yang bangkit tersebut adalah kalangan Islam. Dengan sistem ekonomi bebas, mereka berhasil masuk ke dalam kancuh pertarungan ekonomi tanpa harus khawatir didiskriminasi oleh kekuatan ekonomi terpinpin yang dikuasai oleh kalangan sekuler-militer. Menurut M. Hakan Yavuz, *Opportunity Spaces, Identity, and Islamic Meaning in Turkey*, para pendukung pasar bebas di Turki tidak datang dari kalangan sekuler, melainkan dari kalangan Islam yang secara tradisional masih menjaga seluruh tradisi ritual agama. Kalangan sekuler tidak mendukung gagasan ekonomi liberal (bebas) karena mereka adalah pemegang kekuasaan kontrol ekonomi melalui militer. Itulah

¹⁷ *Ibid.*

sebabnya, di Turki, kalangan Islamlah yang sangat getol memperjuangkan bergabungnya Turki dengan Uni-Eropa.

Kekuatan “Islam” mulai muncul di Turki menyusul kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyep Erdogan kemudian disusul oleh terpilihnya tokoh Islami Abdullah Gul sebagai presiden menggantikan Ahmed Necdet Sezer. Naiknya kelompok Islami disebut-sebut akan menggerus tradisi sekuler yang telah dirintis oleh Mustafa Kemal Ataturk sejak mula pendirian Turki modern.¹⁸

Para pelaku ekonomi Muslim Turki masuk ke kancan pasar bebas dengan tidak meninggalkan tradisi Islam itu sendiri. Bahkan mereka kerap kali menggunakan simbol-simbol “Islam” dalam pelbagai transaksi ekonomi liberal atau kapitalis tersebut. Mereka menjadikan segala ritual dan simbol-simbol Islam sebagai komoditas yang sangat penting. Busana Muslim bahkan menjadi salah satu komoditas penting di kalangan masyarakat Islam Turki. Dalam hal ini, Islam tidak hanya menjadi agama, melainkan juga menjadi komoditas ekonomi.

Prinsip seperti ini didukung sepenuhnya oleh kalangan agamawan. Bahkan mereka menetapkan bahwa prinsip ekonomi Islam sangat sesuai dengan prinsip ekonomi kapitalis, yakni perdagangan bebas. Muhammad bahkan dijadikan rujukan utama dalam aktivitas perdagangan bebas tersebut. Muhammadlah yang memberi contoh bahwa perdagangan harus dilakukan antar negara secara bebas.

¹⁸ *Abdullah Gul*, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2008 pukul 16:00 WIB melalui http://alfanalfian.multiply.com/journal/item/146/ABDULLAH_GUL.

Hakan Yafuz menyebut fenomena ini dengan istilah *The Islamic Ethics and The Spirit of Capitalism*.¹⁹

Berangkat dari penerapan sekularisme secara brutal dan unik, masyarakat Muslim Turki tumbuh secara unik pula. Mereka tidak sepenuhnya membenci sekularisme, melainkan menawarkan cara pandang baru, baik terhadap sekularisme ala Turki maupun terhadap tradisi keislaman itu sendiri. Mereka mengusung sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam (agama atau tradisi) tetapi pada saat yang sama tidak melupakan prinsip kebebasan. Kebebasan bahkan dimaknai secara teologis sebagai sebuah perintah yang esensial di dalam agama itu sendiri.

a. Masa kepemimpinan kerajaan Turki Utsmani

Muhammad II, putra Sultan Murad, dalam usianya yang dua puluh empat tahun, berhasil menjatuhkan ibukota kemaharajaan Romawi Timur, Konstantinopel yang perkasa pada tahun 857 H (1453 M). Peristiwa ini telah membangkitkan kembali harapan kaum muslimin, dan sekaligus menempatkan bangsa Turki yang dipimpin dinasti Usman itu pada posisi kepemimpinan umat Islam serta mengembalikan kekuatan dan kedudukan kaum muslim di mata dunia.

Jatuhnya Konstantinopel ini yang selama delapan abad tidak berhasil dijatuhkan oleh kaum muslimin member bukti bahwa Turki Utsmani benar-benar tangguh, disamping keunggulan mereka dalam taktik strategi serta teknologi perang, adanya kepemimpinan militer yang jitu, dan kekuatan persenjataan yang melebihi semua kekuatan bangsa-bangsa lain pada zamannya, ditambah semangat

¹⁹ *Ibid.*

juang yang tinggi dengan mengerahkan segala ilmu dan daya yang ada. Semua itulah yang harus dimiliki oleh umat Islam.

Bangsa Turki Utsmani memiliki sejumlah keistimewaan yang memungkinkan mereka menempati panggung kepemimpinan kaum Muslimin. Keistimewaan-keistimewaan itu ialah:

Pertama, mereka adalah bangsa yang dinamis, berpandangan yang luas, memiliki semangat juang yang tinggi. Sesuai dengan taraf perkembangannya sebagai bangsa yang belum lama meninggalkan kehidupan nomad, bangsa Turki tidak mempunyai penyakit moral dan sosial yang telah meruntuhkan umat-umat Islam di dunia Timur.

Kedua, mereka mempunyai angkatan perang yang tangguh, yang mampu meluaskan kekuasaan Islam di bidang spiritual maupun fisik, mampu menanggulangi musuh-musuh dunia Islam, dan mampu menunjukkan diri sebagai pemimpin dunia. Sejak awal kekuasaannya, kerajaan Turki Utsmani telah melengkapi angkatan perangnya dengan persenjataan perang, terutama jenis senjata api, mengandalkan penggunaan meriam, serta memakai senjata-senjata yang paling mutakhir. Mereka menyusun taktik perang, mengelola organisasi, serta operasi militer, sehingga tidak diragukan lagi merekalah pelopor teknologi perang yang menjadi teladan ideal Eropa. Bangsa Turki berkuasa di tiga benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Didunia Timur kekuasaannya meliputi Persia sampai Maroko. Mereka menaklukkan Asia kecil dan maju terus sampai Eropa, hingga ke dinding kota Wina. Mereka merajai Laut Tengah dan mereka menciptakan ‘danau Turki Utsmani’ yang bebas dari pengaruh negara-negara di sekitarnya. Seorang

kepercayaan Kaisar Petrus yang Agung menulis laporan kepadanya dari Konstatinopel bahwa Sultan-sultan di Turki menganggap Laut Hitam sebagai wilayah teritorialnya yang tidak boleh dimasuki oleh pasukan asing. Mereka telah membangun suatu armada raksasa yang tidak mungkin ditandingi oleh seluruh Eropa. Pada tahun 945 H (1457 M) Armada gabungan yang terdiri dari Roma, Venesia, Spanyol, Portugis, dan Malta tidak berhasil mengalahkan armada Turki pada zaman Sultan Sulaiman, Kerajaan Turki Utsmani telah menjadi raja di lautan, dan raja di daratan, serta menggenggam dua kekuasaan yaitu kekuasaan politik dan kekuasaan spiritual.

Pada masa pemerintahan Sulaiman, kerajaan Turki Utsmani meliputi wilayah seluas 400 ribu mil persegi dari sungai Sawa di utara ke muara sungai Nil di selatan, dan dari gagasan Pegunungan Kaukasus di timur sampai ke pegunungan Atlas di Barat.

Armada Turki terdiri dua ribu kapal perang, dan di baris timur armada ini menguasai Laut Swedia, Laut Adriatik, Selat Marmora, Laut Azaq, Laut Hitam, Laut Merah dan Laut Persia. Semua kota penting di dunia lama, kecuali Roma, telah masuk ke dalam kekuasaan Turki. Seluruh Eropa dibuat gentar, dan banyak Raja-raja Kristen meminta perlindungannya. Lonceng gereja dihentikan bunyinya jika ada Sultan Turki berkunjung. Paus memerintahkan sembahyang khusus dan memanjatkan doa syukur selama tiga hari ketika dia mendengar Sultan Muhammad al-Fatih meninggal dunia.

Ketiga, bangsa Turki menempati wilayah paling strategis dalam peta dunia. Mereka berada di Jazirah Balkan, tempat yang tepat untuk mengawasi

perkembangan di Asia dan Eropa. Kota Istanbul (Konstantinopel), berada diantara Laut Hitam dan Laut Putih (Laut Tengah) yang langsung berhubungan dengan daratan Asia dan daratn Eropa, itulah kota yang paling tepat bagi sebuah kerajaan besar yang menguasai tiga benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Napoleon pernah berkata, “Seandainya seluruh dunia ini menjadi satu kerajaan saja, pastilah Konstantinopel menjadi kota yang paling baik sebagai Ibukotanya.”²⁰

Bangsa Turki telah menjanjikan peranan besar bagi masa depan Eropa, lewat kekuatan yang penuh vitalitas dan semangatnya yang memendam hasrat untuk maju. Seandainya Allah member kesempatan, pastilah mereka mampu menciptakan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran melebihi bangsa-bangsa Eropa Kristen dan pastilah mereka tampil menjadi para pelopor yang membimbing dunia ke arah kebenaran dan jalan benar sebelum Eropa menjerumuskannya ke api kehancuran.²¹

b. Kemunduran Turki Utsmani

Keruntuhan Imperium Turki Utsmani merupakan peristiwa yang kompleks bagi sebuah transformasi masyarakat Islam dari sebuah kerajaan menuju negara modern. Pada proses keruntuhannya, Imperium Turki Utsmani merupakan wilayah yang sangat luas dan meliputi semenanjung Balkan, Asia kecil, Arab Timur Tengah, Mesir dan Afrika Utara. Pengaruhnya menjangkau Asia Tengah, Laut Merah, dan Gunung Sahara. Pada abad ketujuh belas, situasi politik Turki Utsmani diwarnai dengan kebijakan desentralisasi yang memberi peluang para

²⁰ Erik J Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 39.

²¹ *Abdullah Gul Dilantik Sebagai Presiden Baru Turki*, diakses pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2008 pukul 15:00 WIB melalui <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-08/2007-08-28-voa9.cfm?CFID=221231395&CFTOKEN=76801217>.

musuh kerajaan yang untuk menyusun kekuatan dan menjadi besar sekaligus menjadi pesaingnya di bidang politik dan ekonomi. Pada abad kesembilan belas, kerajaan Turki Utsmani mulai melakukan konsolidasi kekuasaan atas propinsi-propinsi bawahan, mensentralisasi kekuasaan negara, memperkuat struktur politik, ekonomi, sosial, serta melakukan reformasi kebudayaan dengan sebuah harapan mensejajarkannya dengan kekuatan efektif dalam percaturan dunia.²²

Penaklukan kota-kota Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, oleh tentara Mongol pada tahun 1258 tidak berarti berakhirnya kelanjutan sejarah politik Islam. Setelah masa-masa tersebarnya kekuasaan Islam di beberapa pusat pemerintahan, kekuasaan politik Islam terkonsentrasi dalam tiga kesultanan besar, yaitu kesultanan Sunni Moghul di India, Kesultanan Shi'I Safavid di Persia, dan Kesultanan Ottoman atau Utsmani di Turki.

Dengan menguasai teknologi peperangan, ketiganya mampu menguasai wilayah Afrika utara, Timur Tengah, Asia Tengah dan selatan serta Eropa Tenggara (Balkan). Perkembangan kekuasaan politik ketiganya di wilayah yang luas tersebut, terutama peran Kesultanan Turki Utsmani hingga periode modern, sejak 1800, terletak pada dukungan dari ideologi religius dan kekuatan militer.²³

Periode sejarah Islam tersebut tidak sepenuhnya mutlak menjadi periode keemasan bagi kekuasaan politik Islam tersebut. Kesultanan Utsmani khususnya, sejak abad ke tujuh belas mulai mengalami titik balik kejayaannya. Masa keemasan kesultanan Monarki ini sesungguhnya telah dicapai pada pemerintahan

²² *Ibid.*

²³ *Turki Tahan Dua Mantan Jenderal Karena Terlibat Usaha Kudeta*, diakses pada hari rabu, 4 Juni 2008 pukul 13:10 WIB melalui <http://www.antara.co.id/arc/2008/7/6/turki-tahan-dua-mantan-jenderal-karena-terlibat-usaha-kudeta/>.

Sulayman yang Agung (*Sulayman the Magnificent*) tahun 1520 hingga tahun 1566 dengan kekuatan militer-militernya yang mengagumkan hingga berhasil menerobos Eropa Tengah dan hampir memasuki kota Wina di Austria. Ketika Turki Utsmani besar bersama dua kerajaan lain, Safavid di Persia dan Moghul di India, sultan-sultan dari dinasti Utsmani mendominasi Timur Tengah, daerah Balkan dan sebagian Eropa Tengah.

Pada abad ketujuh belas hingga kedelapan belas, terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki Utsmani. Berakhirnya ekspansi kerajaan Turki Utsmani, lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer. Perseteruan panjang antara pemerintah pusat dengan elit lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari rakyat muncul ke permukaan, dan kekuasaan dialihkan dari pemerintahan pusat kepada kelompok Jenissari, ulama dari keluarga Utsmani yang telah mapan dalam masyarakat setempat. Di sisi pemerintah pusat, meredupnya kekuasaan merupakan dampak dari korupsi yang menggejala di pemerintahan Utsmani. Akan tetapi situasi tersebut dalam pandangan penguasa lokal dan pedagang berarti reduksi kekuatan eksploitatif pemerintahan pusat, dan memberikan peluang bagi otonomi daerah. Kejatuhan kerajaan Turki Utsmani merupakan sebuah proses sejarah panjang dan tidak terjadi secara tiba-tiba. Dalam sejarahnya selama lima abad (pada akhir abad ketiga belas hingga awal abad kesembilan belas) kerajaan Turki Utsmani mengalami pasang surut. Di satu sisi, sebuah sistem politik yang diwarisi dari pendahulunya, Turki Saljuq,

yaitu menjadikan kerajaan adalah milik keluarga kerajaan dan menjadikan sultan sebagai sentral kekuatan politik, membuat kerajaan ini begitu rentan terhadap faktor-faktor kejatuhan sebuah dinasti. Seorang sultan yang lemah saja sudah dapat membuka jalan bagi proses kejatuhan kerajaan. Meskipun demikian, seorang sultan yang kuat, pada masa pemerintahannya juga mampu memperlambat kejatuhan dinasti. Pada sisi yang lain, sistem politik tradisional bangsa Turki yang diwarisi oleh dinasti Turki Utsmani, membuat dinasti ini membentuk sebuah kekuatan sosial politik dan budaya untuk masa waktu yang lama. Di antara beberapa hal yang patut dipandang sebagai penyebab kejatuhan dinasti Turki Utsmani adalah melemahnya sistem birokrasi, melemahnya kekuatan militer Turki Utsmani, hancurnya perekonomian kerajaan, muncul dan menguatnya kekuatan baru di daratan Eropa dan serangan balik terhadap kerajaan Turki Utsmani.

Kegagalan militer dan ekonomi kesultanan tersebut menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi melakukan pengerahan politik dan memenuhi kewajiban-kewajiban sosialnya. Ketidakmampuan kesultanan untuk memenuhi kewajiban politik, sosial, dan ekonomi itu yang kemudian menurunkan wibawa pemerintah. Tanpa kesultanan yang kuat dan didukung oleh perangkat birokrasi yang sehat, militer yang tangguh dan loyal, dan kemampuan menyejahterakan rakyat, maka kesultanan tidak lagi mempunyai arah dan tujuan yang jelas.

Pada akhir abad kedelapan belas, dan efektif pada abad kesembilanbelas, Turki telah masuk ke dalam pola hubungan metropolis satelit yang klasik dengan Eropa. Ketika perekonomian Eropa terus berkembang dan membanjiri Turki

dengan barang-barang produksinya, Turki sebagai sebuah satelitnya tetap tidak berkembang dan terbelakang secara ekonomi. Belanja negara terhadap barang-barang dari Eropa, seperti misalnya pembangunan rel kereta api dan pembangunan jaringan telekomunikasi, telah membuat kesultanan memiliki beban hutang yang cukup tinggi. Untuk melunasi hutang-hutangnya itu, aparat kesultanan terpaksa membebankan peningkatan pemasukan keuangan dari pajak yang lebih ditingkatkan jumlahnya kepada para petani dan memberi lebih banyak konsesi kepada perusahaan-perusahaan asing.

Dengan beban yang semakin berat itu, ketidakpuasan rakyat cenderung berubah menjadi pemberontakan. Semenjak pemberontakan di Bosnia Herzegovina tahun 1875 hingga perang Balkan tahun 1912 yang banyak disokong oleh golongan non-Islam, kesultanan mulai menghadapi gangguan yang terus menerus dari propinsi-propinsi di Eropa dan Balkan. Proses keruntuhan kesultanan terus berlangsung dan berbagai upaya pembaharuan dan perbaikan untuk mempertahankan kesultanan kurang menghasilkan hasil yang nyata. Dominasi peran Islam yang telah dimainkan dalam sejarah dunia dengan cepat hilang, ketika Eropa dengan pengalaman yang cukup dengan berbagai kreatifitas dan inovasinya mulai menunjukkkan kepada dunia peran mereka yang menentukan. Situasi itu digambarkan oleh Marshal Hudson dengan mengatakan, “hampir seluruh daerah-daerah pusat Islam dengan cepat telah menjadi daerah yang mengalami stagnasi kemajuan (*becoming a backwater*)”.²⁴

²⁴ *Ibid.*

Paham sekularisme di Turki mulai diberlakukan di Turki ketika Mustafa Kemal Attaturk berhasil menumbangkan kekhalifahan Utsmaniyah pada tahun 1923. Mustafa Kemal dengan dukungan militer mendirikan sebuah negara republik di atas puing-puing reruntuhan dinasti tersebut dan menarik jauh-jauh wacana kehidupan negara dari wacana Islam. Untuk mewujudkan cita-cita politiknya pada tanggal 3 Maret 1924, Kemal mengeluarkan undang-undang yang berisi penghapusan khilafah, pengusiran Khalifah dan penggusuran Islam dari kehidupan politik, hukum, dan kemasyarakatan.

Undang-undang tersebut sebenarnya perwujudan dari perjanjiannya dengan Inggris sebagai syarat kemerdekaan Turki yang populer dengan perjanjian carzon. Perjanjian itu berisi empat poin: (1) Memberangus apa saja yang berhubungan dengan Islam, (2) Menghapus sistem Khilafah Islamiyah, (3) Mengusir Khalifah, merampas kekayaannya dan memburu setiap pendukung Khalifah dan Islam dan mengusirnya dari Turki, (4) Menerapkan konstitusi sekuler sebagai pengganti konstitusi yang berdasarkan Islam.²⁵

Upaya-upaya mengenyahkan identitas Islam atau disebut deislamisasi itu adalah:²⁶

1. Membangun negara Turki dengan bentuk pemerintahan sistem republik yang berbasas sekularisme di segala bidang kehidupan dan menghapus sistem khilafah.
2. Hak dan fasilitas Sultan dihapus serta mengusirnya beserta keluarganya ke luar negeri.

²⁵ *Abdullah Gul Jadi Presiden Turki*, diakses pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2008 pukul 20:00 WIB melalui <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/29/Internas/int01.htm>.

²⁶ *Ibid.*

3. Mewajibkan rakyat Turki memakai topi Eropa (pada waktu itu topi Eropa oleh Muslim Turki dipandang sebagai simbol kekafiran).
4. Menerapkan hukum positif buatan Eropa.
5. Mengembalikan kepercayaan paganisme bangsa Turki kuno seperti penyembahan serigala putih (Bazcorat).
6. Menjunjung tinggi panji-panji nasionalisme sempit.
7. Menghapus huruf Arab dan menggantinya dengan huruf latin.
8. Melarang poligami dan memberlakukan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.
9. Membangun sekolah-sekolah seni tari yang mengajarkan tarian dari timur dan barat.
10. Melarang *hijab* (jilbab).
11. Membebaskan wanita untuk kerja dimana saja.
12. Membangun teater-teater dan mendorong rakyatnya untuk mengadakan pesta-pesta dansa.
13. Mengubah dua Masjid Agung Aya Sofia dan Al-Fatih menjadi museum.
14. Membangun ladang-ladang percontohan dengan ternak sapi dan babi.
15. Memaksa rakyat Turki menyuarakan adzan dengan bahasa Turki.
16. Memasukan kalender Barat untuk mengganti kalender Hijriyah.
17. Menghapus hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
18. Menetapkan hari Ahad sebagai hari libur menggantikan hari jumat.
19. Melarang kaum Muslimin Turki melaksanakan ibadah haji.

B. Proses Pem-Baratan dan Upaya-upaya awal untuk Modernisasi

Proses pem-Baratan di Turki merupakan hasil dari gerakan revolusioner yang ditimbulkan oleh banyak faktor, sejak kemunduran imperium Utsmaniyah yang tampak dalam beberapa bentuknya. Gerakan ini memperoleh momentumnya setelah revolusi Prancis, dan terus berkembang dengan kuat sepanjang abad XIX.

1. Era Revolusi Turki Muda (1908)

Pertumbuhan nasionalisme Turki dan pembentukan Republik Turki adalah hasil-hasil langsung dari gerakan Revolusi Turki Muda. Mustafa Kemal berhasil dalam melaksanakan pembaharuan-pembaharuan ala barat, terutama karena dasarnya telah disiapkan oleh pendahulu-pendahulunya. Ini tidak berarti menolak kepribadiannya yang kharismatik, posisinya yang tunggal sebagai pahlawan revolusi Turki dan kekuatan dinamis dari nasionalisme Turki sendiri, yang sudah barang tentu merupakan faktor-faktor yang sangat penting yang menyebabkan sukses rezim Kemal dalam pem-Baratan. Mustafa Kemal berusaha untuk membawa Turki dalam orbit peradaban Barat untuk mengakhiri permusuhan yang berabad-abad lamanya antara kekuatan-kekuatan Eropa dan Turki.²⁷

Sebagaimana telah kita ketahui, Mustafa Kemal telah mulai mengkonsolidasikan posisi politiknya bahkan sebelum perang kemerdekaan berakhir dengan penandatanganan dan ratifikasi Perjanjian Lausanne. Cara-cara yang digunakannya adalah: perubahan dalam undang-undang Pengkhianatan Tinggi, pembubaran majelis dan penyelenggaraan pemilihan umum yang diawasi dengan ketat, pembentukan partai baru, Partai Rakyat, dan pengambilalihan

²⁷ Erik J Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 118.

seluruh fungsi organisasi perlindungan hak-hak oleh partai ini. Proses konsolidasi itu, yakni menghimpun kekuasaan di tangan Mustafa Kemal dan majelis serta partai berada dibawah pengawasannya, dilanjutkan setelah datangnya perdamaian.²⁸

Mustafa Kemal mengajukan sebuah proposal untuk memproklamkan Turki menjadi republik, dengan seorang presiden yang sudah dipilih, seorang perdana menteri yang diangkat oleh presiden dan sebuah sistem cabinet konvensional. Mayoritas orang di majelis menerima proposal itu dan tanggal 29 Oktober 1923 Republik Turki diproklamkan, dengan Mustafa Kemal sebagai Presiden yang pertama dan Ismet Inonu sebagai Perdana Menterinya yang pertama.²⁹

Tujuan yang dipegang oleh pembaharu-pembaharu Turki yang mula-mula dari abad-abad XVIII dan XIX adalah untuk mencari Modus Vivendi untuk imperium Utsmaniyah dengan meminjam ide-ide dan teknik Barat. Dengan tumbuhnya elite yang berpendidikan Barat dan suksesnya gerakan untuk mendirikan monarki Konstitusional, Turki Muda memimpin suatu “persemakmuran Utsmaniyah” yang kuat (*Ottoman Commonwealth*). Tetapi mereka segera kecewa karena adanya tendensi-tendensi separatis dari Millet Utsmaniyah yang memperoleh kemerdekaan nasional mereka sendiri. Dengan timbulnya nasionalisme Turki dan permulaan Perang kemerdekaan Turki (1919), Imperium Utsmaniyah dibubarkan. Rezim Kemal yang memperoleh kekuasaan pada tahun 1920 didasarkan pada prinsip Barat tentang Kedaulatan nasional.

²⁸ “Aksi Militer Turki di Utara Irak”, diakses pada hari minggu, 7 September 2008 pukul 12:00 WIB melalui <http://konsultasi.wordpress.com/2008/03/24/aksi-militer-turki-di-utara-irak/>.

²⁹ *Ibid.*

Turki terbelang kepada bangsa Turki, dan dengan itu negari itu harus diperintah oleh mereka sendiri sesuai dengan aspirasi nasional mereka. Tujuan yang diajukan oleh Mustafa Kemal bagi Negara nasional Turki yan baru adalah nasionalisme dan pem-Baratan penuh. Tujuan akhir ini adalah “untuk berbaris bersama-sama dengan peradaban Barat, bahkan akan berusaha untuk mencuri satu langkah mendahului peradaban Barat itu.”³⁰

Ini merupakan pendekatan radikal terhadap masalah modernisasi yang belum pernah dilakukan oleh negeri Muslim manapun, kecuali Turki. Ini merupakan hasil dari Revolusi Turki yang membina kebijaksanaan rezim Kemal. Usaha telah dilakukan untuk menciptakan versi modern dari Islam dibawah bimbingan Fakultas Teologi, Universitas Istambul, tetapi rencana itu gagal karena tidak dapat diterima.³¹ Oleh karena itu rencana pem-Baratan yang sebenarnya dilaksanakan Mustafa Kemal terutama adalah progam politik dan ekonomi dari Negara nasional Turki dengan orientasi kultural. Program ini dilaksanakan oleh Partai Republik Rakyat, setelah Mustafa Kemal wafat, di bawah pimpinan penggantinya, Ismet Inonu.

Doktrin Kemalis berupa sekularisasi penuh Turki dan menjunjung tinggi konsep nasionalisme. Doktrin ini dimasukkan dala program Partai Republik Rakyat, juga dalam Konstitusi Turki tahun 1924. Dalam teori, agama dan negara diharapkan berfungsi secara sendiri-sendiri. Namun dalam prakteknya, agama berada di bawah kekuasaan negara dengan didirikannya Direktorat Urusan Agama langsung di bawah supervisi Perdana Menteri. Keadaan ini menimbulkan

³⁰ *Ber-Islam ala Turki*, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2008 pukul 17:00 WIB melalui <http://saidiman.wordpress.com/2007/>.

³¹ *Ibid.*

pertentangan yang tajam sekali antara golongan sekularis dan Islamis, yang terus nampak dalam berbagai macam tingkatan hingga dewasa ini. Tekanan opini rakyat berhasil memperkenalkan pendidikan agama secara pilihan. Pendidikan agama secara wajib diperkenalkan oleh rezim Menderes setelah kemenangan besar dari Partai Demokrat dalam pemilihan umum bulan Mei 1950.

Partai Demokrasi berusaha untuk memberikan interpretasi kembali terhadap prinsip-prinsip kemalisme. Maksudnya adalah supaya dapat mempertahankan pembaharuan-pembaharuan yang dengan sukses telah dilakukan oleh rakyat dan menolak pembaharuan yang tidak memperoleh penerimaan yang luas dari rakyat.³² Akibatnya, pengawasan negara terhadap agama menjadi kendor. Hasil utama dan perubahan kebijaksanaan ini adalah kebangkitan Islam secara merata di Turki. Hal itu tampak dari kegiatan agama, pendidikan, politik dan hubungan luar negeri. Sikap isolasi terhadap dunia Islam diakhiri pada waktu Turki menjadi anggota Pakta Bagdad, dimana Pakistan, Iran dan Irak menjadi anggotanya. Pada waktu Irak meninggalkan Pakta Bagdad itu setelah Revolusi 1958, Pakta itu dinamakan *Central Treaty Organization* (CENTO) dan kantor pusatnya dipindahkan ke Ankara.

Setelah jatuhnya rezim Menderes pada 27 Mei 1960, pemerintahan militer yang dikepalai oleh Jenderal Kemal Gursel memegang tampuk pimpinan. Junta yang memerintah diwakili oleh Komite Persatuan Nasional, yang menekankan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip Kemalisme. Konstitusi baru disusun oleh

³² *Abdullah Gul*, diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2008 pukul 16:00 WIB melalui http://alfanalfian.multiply.com/journal/item/146/ABDULLAH_GUL.

Dewan Konstituante yang disetujui oleh referendum pada bulan Juli 1961, dimana empat dari enam prinsip pokok dari Konstitusi tahun 1924 diambil, yaitu sekularisme, republikanisme, revolusionisme, nasionalisme, bersama-sama dengan sosialisme. Corak yang mencolok pada Konstitusi tahun 1961 itu adalah adanya fasal-fasal tentang adanya sistem Legislatif Dua Kamar, hak-hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan yang lebih jelas antara kekuasaan kehakiman, eksekutif, dan legislative. Setelah pemilihan umum 14 Oktober 1961, suatu Pemerintahan koalisi dibentuk di bawah Perdana Menteri Ismet Inonu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Partai Republik Rakyat. Kekalahan Partai Republikan dalam pemilihan umum tahun 1950 dan 1954, dan dimasukkannya pada pemerintahan koalisi adalah petunjuk tentang menurunnya kekuasaan dan prestise kaum sekularis, jika dibandingkan dengan keadaan pada zaman Mustafa Kemal dan beberapa tahun setelah itu.

Pembaratan rupa-rupanya hanya mempunyai pengaruh yang sangat kecil pada rakyat pedesaan yang merupakan kurang lebih tiga perempat dari seluruh penduduk Turki. Rakyat yang bisa membaca dan menulis diperkirakan ada 20%, sekalipun angka resmi menunjukkan lebih daripada itu. Diantara rakyat yang terdidik yang hidup di kota-kota besar, kelas baru dari orang-orang Muslim yang cerah timbul yang sangat menaruh perhatian pada warisan-warisan Islam. Fenomena ini sebagian disebabkan karena pendidikan agama yang dilakukan oleh rezim demokrasi dan sebagian lagi karena kekecewaan mereka terhadap pendidikan sekular. Mayoritas rakyat Turki tetap tekun dalam mengamalkan

ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari, bahkan setelah diadakan pembaharuan-pembaharuan ala Barat di Republik Turki.³³

2. Turki Modern

Turki Modern adalah sebuah negara dengan ide abstrak, bukan sebuah negara sebagaimana pandangan orang-orang Barat dalam memahami istilah itu; Negara itu adalah sekumpulan imperium multi-etnis yang musnah pada Perang Dunia I, dan sebuah proyek atas sebuah negara yang maju karena pandangan seorang pemimpin yang visioner yang sayangnya tidak dapat menembus lapisan bawah kelompok-kelompok etnis, bahasa dan sejarah yang menjadikan Turki modern kurang dari jumlah bagian-bagian yang seharusnya ada. Tentara Turki masih merupakan sebuah lembaga institusi dominan hanya karena tidak ada entitas lain yang dapat mengatur petani-petani miskin dari dataran tinggi Anatoli agar sesuai dengan program sekuler.

Yang menjadi masalah adalah tidak ada banyak pengikut Kemal di Turki. Untuk menggantikan identitas kerajaan dari Imperium Ottoman, Kemal memperkenalkan Turkum, atau Ke-Turkian, suatu identitas nasional yang didirikan atas banyak peradaban yang telah memerintah negara semenanjung itu. Identitas etnis dalam pandangan nasionalisme Eropa tidak menjelaskan baik itu Imperium Ottoman maupun negara Kemalis. Orang Turki Orghuz yang menaklukkan wilayah pedalaman Imperium Byzantium selama abad ke-12 tidak lebih hanyalah penduduk minoritas. Pada puncak penaklukkan yang mereka

³³ *Ibid.*

lakukan selama abad ke 17, imperium Ottoman menguasai lebih banyak orang Kristen dibanding orang Muslim.

Kemal menciptakan Turki modern dengan membuang setiap usaha kekuatan Barat untuk memecah belah negaranya setelah kekalahan Negara itu pada Perang Dunia, tapi ongkos untuk hal itu teramat mahal. Dua puluh juta penduduk Imperium berkurang menjadi hanya 7 juta saja (perkiraan seorang pejabat pemerintah Perancis) pada tahun 1924. Lebih dari satu setengah juta orang Kristen Armenia dibunuh selama tahun 1914-1918 atas dorongan pemerintah Turki, untuk menetralsir sikap penduduk yang dianggap bersimpati pada lawan selama masa perang. Kebanyakan dari pembunuhan itu dilakukan oleh suku Kurdi. Satu setengah hingga tiga juta penduduk Kristen Ortodox Yunani, yang nenek moyangnya telah tinggal di Asia Kecil selama ribuan tahun sebelum orang-orang Turki datang, diusir pada tahun 1924 sebagai akhir Perang Yunani-Turki.

Dengan demikian Turki modern mulai tumbuh bukan hanya oleh beraneka ragamnya sisa-sisa imperium, tapi juga dengan berkurangnya hampir setengah penduduknya pada tahun 1924. Karena konsep Kemal memerlukan dukungan bagi identitas nasional yang tidak pernah ada, Turki telah menghindari suatu konsensus kaum minoritasnya sejak tahun 1965. Mungkin 30% dari penduduknya adalah orang Kurdi, dimana integrasi mereka dengan negara Turki adalah tidak pasti. Suku Kurdi terkonsentrasi di wilayah Timur Turki, di suatu wilayah yang sebelum tahun 1918 dikenal sebagai Armenia Barat karena suku Kurdi mengganti posisi orang-orang Armenia yang dibantai. Terlebih lagi, ada tiga juta orang Kirkasian, dua juta orang Bosniak, satu setengah juta orang Albania, sejuta orang Georgia,

dan berbagai macam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Tapi di dalam wilayah yang bahkan terdapat kelompok mayoritas yang dianggap sebagai “beretnis Turki” pun masih ada lapisan penghalang dan memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyatukan suku-suku dan peradaban itu.

Kaum Kemal telah mendapat hasil yang beraneka ragam dalam usaha mereka untuk menyatukan kelompok yang berbeda secara etnis dan budaya untuk menjadi sebuah identitas baru dengan disain baru. Apa yang terkadang disebut sebagai “kegelapan malam”, dimana kelompok rahasia Kemalis mengendalikan militer dan dinas intelejen.

Seperti pendahulunya Ottoman, kaum Kemalis baru menyadari adanya bahaya ini dengan sangat terlambat. Tahun ini, Pengadilan Konstitusi berusaha untuk melarang partai AKP, partainya Erdogan, karena berusaha untuk meruntuhkan Negara sekuler. Mungkin saja, bahwa ini adalah penindasan akan apa yang seharusnya merupakan kudeta, maupun tindakan pendahuluan atas taktik terakhir dari kaum sekularis, yakni intervensi militer dan mencegah Turki tergelincir kedalam pelukan kelompok Islam.

Turki pada saat ini terdiri dari 70 juta penduduk yang tidak mengetahui siapa diri mereka. Jika hologram berputar ke arah Islam, yakni, kembali kepada syariah dan kehidupan tradisional sebagai lawan dari kehidupan yang modern, Turki tidak lagi akan serupa dengan Negara “Muslim moderat” pada tahun 2008 daripada Turki masa Kemal dan serupa dengan Imperium Ottoman tahun 1908. Menurut seorang analis Turki, “Gerakan Islam di Turki berada pada suatu koalisi yang luas dan bervariasi dimana AKP hanyalah batang hidungnya. Hal Ini

didisain untuk melihat kaum moderat secara hati-hati dan menghilangkan kecurigaan baik pada militer dan opini dunia. Beberapa unsur AKP, tidak diragukan lagi, bersikap moderat atau pragmatis dan layak mendapatkan reputasi yang demikian. Tapi seiring dengan partai itu, ada begitu banyak gerakan Islam yang merakyat yang pada saat ini bekerja untuk merubah masyarakat dan lembaga-lembaga Turki. Revolusi terus dilakukan oleh AKP untuk memajukan Turki dengan mengajukan Abdullah Gul menjadi calon presiden di Turki.

C. Sistem Pemerintahan Turki

Turki merupakan negara Republik demokratis dengan Sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.³⁴

Presiden memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan di Turki. Apa yang dilakukan oleh presiden harus dapat dipertanggungjawabkan oleh presiden kepada masyarakat. Parlemen akan mengontrol jalannya aktivitas pemerintahan

³⁴ *Sistem parlementer*, diakses hari Jum'at, 21 November 2008 pukul 13:30 WIB, melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

yang dilakukan presiden. Artinya, meskipun presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan namun kewenangan tersebut bersifat terbatas karena segala aktifitasnya akan dikritisi oleh parlemen.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Dalam sistem ini dilakukan pengawasan terhadap eksekutif dan legislatif, jadi kekuasaan parlemen yang besar dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan pada rakyat, maka pengawasan atas jalannya pemerintahan dilakukan wakil rakyat yang duduk di parlemen. Dengan begitu Dewan Menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (eksekutif) bertanggung jawab kepada Parlemen (Legislatif).

1. Eksekutif

Dalam sistem parlementer para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab, sedangkan raja dalam monarki konstitusional dinamakan “bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat (the king can do no wrong).”³⁵

³⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2008), hlm. 295.

Badan Eksekutif ditetapkan menjadi pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pihak Legislatif (Parlemen). Eksekutif berasal dari kata eksekusi (*execution*) yang berarti pelaksana. Eksekutif adalah pemerintah dalam arti sempit yang melaksanakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan perundang-undangan dan haluan negara, untuk mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan sebelumnya. Organisasinya adalah kabinet atau dewan menteri-menteri, di mana masing-masing menteri memimpin departemen dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya. Bila kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, maka Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, sehingga raja (dalam suatu kerajaan) atau presiden (dalam suatu negara republik) hanya sebagai kepala negara saja.³⁶

2. Legislatif

Badan Legislatif atau Legislature mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah Assembly yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi adalah parliament, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (parler) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's Representative Body* atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan

³⁶ Inu kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 121.

tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.³⁷

Majelis Agung Nasional Turki (parlemen) adalah sebuah lembaga legislatif yang didirikan di Ankara pada tanggal 23 april 1920. Majelis Agung Nasional Turki merupakan parlemen satu kamar (monokameral). Tugas parlemen Turki adalah menyusun undang-undang, dan jika dilakukan perubahan atas undang-undang maka harus mendapatkan persetujuan presiden, bukan perdana menteri.

3. Yudikatif

Lembaga Yudikatif adalah lembaga peradilan, yang memiliki kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Yudikatif dipegang oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kekuasaan yudikatif harus merdeka, bebas terutama dalam pengaruh pihak lembaga-lembaga tinggi lainnya, eksekutif yang selalu ingin menonjol.³⁸

Mahkamah Konstitusi Turki didirikan pada 26 April 1962, sesuai dengan ketentuan konstitusi 1961. Mahkamah Konstitusi Turki (*Anayasa Mahkemesi*) adalah badan hukum tertinggi untuk peninjauan konstitusional di Turki. Mahkamah ini "memeriksa konstitusionalitas, dalam pengertian bentuk dan substansinya, dari semua hukum, dekrit yang memiliki kekuatan hukum, dan Aturan-aturan Prosedur dari Dewan Nasional Agung Turki" (Pasal 148 dari Konstitusi Turki). Apabila perlu, badan ini juga berfungsi sebagai Mahkamah

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: PT GramediaPustaka Utama, 2008), hlm. 315.

³⁸ Inu kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), hlm. 124.

Agung (bahasa Turki: *Yüce Divan*) untuk mendengarkan kasus apapun yang diangkat mengenai Presiden Republik, anggota-anggota Dewan Menteri, ataupun presiden dan anggota-anggota Pengadilan Tinggi.³⁹

D. Sistem Politik Turki Lama, Transisi, dan Turki Modern

Politik di Turki dapat digolongkan menjadi Turki lama, transisi, dan Turki modern.

1. Sistem Politik Turki Lama (1925-1945)

Politik Turki lama merupakan sistem politik Turki masa Kemalis, di mana Turki merupakan negara dengan sistem satu partai di masa Kemalis, tahun 1925-1945. Sejak pengumuman undang-undang pemeliharaan ketertiban pada bulan Maret 1925, Turki menggunakannya hingga tahun 1929 untuk membuat stagnannya semua oposisi. Partai yang ada saat itu yaitu Partai Rakyat Republik (PRR) telah membangun monopoli kekuasaan dan pada kongres partai di tahun 1931, politik Turki secara resmi dinyatakan bersistem satu partai. Selanjutnya, tidak terdapat lagi oposisi legal yang aktif di Turki sampai setelah Perang Dunia II.⁴⁰

Menurut konstitusi 1924, segala kekuasaan berada ditangan Majelis Tinggi Nasional Turki yang merupakan satu-satunya wakil sah kedaulatan bangsa Turki. Namun salah satu reaksi dari kepemimpinan PRR terhadap munculnya oposisi tahun 1924 adalah pengetatan disiplin partai sehingga rapat bebas hanya diperbolehkan dalam pertemuan-pertemuan tertutup partai parlementer. Setelah

³⁹ *Mahkamah konstitusi Turki*, diakses hari Jum'at, 21 November 2008 pukul 14:00 WIB melalui http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_konstitusi_turki.

⁴⁰ Erik J Zurcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 217.

keputusan mengenai topik apapun dicapai dalam pertemuan ini, para delegasi terikat dengan keputusan suara mayoritas dan wajib mendukung keputusan tersebut di majelis. Hal tersebut berarti bahwa apa yang didiskusikan di majelis Turki sebetulnya adalah kesimpulan yang sudah dicapai terlebih dahulu.

Selama era satu partai, diskusi yang dilakukan dimajelis hanya suatu formalitas saja. Musyawarah dibatasi, bahkan dalam pertemuan-pertemuan partai parlementer yang berfungsi sebagai forum di mana kabinet mengeluarkan dan menjelaskan keputusan-keputusannya. Fungsi pertemuan yang ada pada intinya hanya meratifikasi dan mensahkan keputusan-keputusan kabinet.

Selain memiliki sebuah organisasi yang berbasis masyarakat luas di seluruh negeri, yang dipimpin oleh sekretaris jenderal, PRR juga didominasi oleh para anggota majelis nasional, kabinet, perdana menteri yang juga merupakan ketua pelaksana partai itu, dan presiden yang merangkap sebagai ketua partai. Negara dan partai teridentifikasi secara erat. Akibatnya, partai tidak dapat mengembangkan kemampuan ideologis atau organisasional dan tidak menjadi *independent*.

Pemilu yang dilakukan empat tahun sekali untuk memilih anggota parlemen terus diselenggarakan pada masa satu partai. Pemilu tersebut hanya berfungsi seremonial saja. Daftar-daftar para calon untuk menduduki kursi-kursi di parlemen disusun oleh ketua partai, ketua pelaksana, dan oleh sekretaris jenderal yang kemudian diratifikasi oleh kongres partai tersebut dan sama sekali tidak terdapat peluang warga negara untuk menjadi wakil di parlemen atas inisiatif sendiri.

Pada tahun 1930, Mustafa Kemal memutuskan untuk mengizinkan dan bahkan mendukung berdirinya sebuah partai oposisi yang loyal dengan tujuan ganda yaitu menyalurkan ketidakpuasan sosial dan membangkitkan semangat PRR yang stagnan. Selanjutnya, Fethi mendirikan sebuah partai yang bernama *Serbest Cumhuriyet Firkasi* (Partai Republik Merdeka). Partai tersebut membuat sebuah manifesto berisi 11 pokok yang melanjutkan manifesto Partai Republik Progresif tahun 1924 dalam hal memperjuangkan kebijakan perekonomian liberal dan penanaman modal asing serta kebebasan berbicara dan pemilihan umum langsung (saat itu Turki masih menganut sistem pemilihan umum dua tahap). Partai baru tersebut disambut dengan antusias oleh masyarakat Turki.

Pada bulan Oktober 1930, pemilu lokal diselenggarakan dan PRM memenangkan 30 dari 512 kursi. Meskipun yang diraih PRM hanya suatu minoritas dari kursi-kursi yang tersedia namun partai yang berkuasa yaitu PRR merasa terancam. Disisi lain, PRM menuduh partai yang berkuasa telah melakukan banyak penyelewengan dan kecurangan pada perhitungan suara. Konflik tidak dapat dihindari, dan akhirnya Fethi menutup PRM tanggal 16 November 1930. Mustafa Kemal tidak mau lagi melakukan eksperimen dengan partai oposisi dan secara resmi pada tahun 1931 Turki menyatakan bersistem satu partai.

Kemal selanjutnya menyediakan sejumlah kursi bagi pihak-pihak *independent*, yaitu 30 kursi dalam pemilu 1931, dan 16 kursi bagi pemilu 1935. Namun hal tersebut tidak efektif, buktinya pada tahun 1931 kursi tersebut tidak keseluruhannya diisi karena banyaknya masyarakat yang tidak mendukung.

Semua surat kabar dan majalah yang berhaluan oposisi liberal atau sosialis telah ditutup pada tahun 1925. Sejak itu yang terbit hanyalah surat kabar yang diawasi oleh pemerintah dengan satu pengecualian yaitu *Yarin* (Esok) yang dipublikasikan tahun 1929-1930 oleh Arif, seorang jurnalis sayap kiri dan teman lama Mustafa Kemal. Namun surat kabar tersebut juga ditutup tahun 1931. Pers dan institusi-institusi pendidikan dimobilisasi untuk menyebarluaskan misi Kemalis.

Sekularisme dan nasionalisme tentu saja merupakan ciri-ciri khas ideologi Turki muda sejak tahun 1913. Namun pada tahun 1930 an, sekularisme dan nasionalisme tersebut bermakna ekstrem, sekularisme diinterpretasikan bukan saja sebagai pemisah negara dan agama tetapi juga sebagai penyingkiran agama dari kehidupan publik dan tegaknya pengawasan negara atas institusi-institusi keagamaan yang masih ada.

Sementara kepemimpinan politik mengontrol sepenuhnya partai dan parlemen, ketegangan-ketegangan secara perlahan muncul dalam tubuh kepemimpinan negara, khususnya antara Ismet yang menjadi perdana menteri selama 12 tahun berturut-turut dari 1925 sampai 1937, dan presiden Mustafa Kemal. Pada tahun-tahun terakhir jabatannya, Kemal menarik diri dari politik dan urusan negara sehari-hari diserahkan kepada Ismet, sementara Kemal tertarik dengan proyek-proyek reformasi yang spesifik, misalnya proyek aksara dan bahasa.

Kemal sering melakukan tindakan yang tidak terkoordinasi dengan keputusan perdana menteri, Ismet. Akhirnya di bulan September 1937, terjadilah pertikaian antara Kemal dan Ismet yang menyebabkan Ismet meletakkan jabatannya pada tahun 1934. Tanggal 10 November 1938, Kemal meninggal dan pada tanggal 11

November 1938, majelis nasional memilih Ismet Inonu sebagai presiden kedua Turki.

2. Sistem Politik Transisi (1945-1965)

Pada masa kepemimpinan Ismet, masyarakat banyak yang tidak menyukai Ismet. Pada tanggal 19 Mei 1945, Ismet menjanjikan akan membuat Turki menjadi lebih demokratis. Pada tanggal 7 Juni 1945, Menderes dengan tiga orang deputi lainnya yaitu Celal Bayar (mantan perdana menteri), Refik Koraltan dan Fuad Koprulu (sejarawan terkenal) mengajukan memorandum kepada partai parlementer, menuntut agar konstitusi Turki diimplementasikan sepenuhnya dan demokrasi ditegakkan. Proposal tersebut ditolak oleh partai yang berkuasa. Selanjutnya pada 25 Mei 1945, pemilu umum lokal diadakan di Istanbul, pemerintah untuk pertama kalinya mengizinkan adanya pilihan bebas diantara berbagai kandidat PRR.

Periode multi partai di Turki bermula pada Juli 1945 ketika seorang industrialis terkemuka di Istanbul, Nuri Demirag, mendirikan partai oposisi *Milli Kalkinma Partisi* (Partai Pembangunan Nasional) yang secara resmi terdaftar pada 5 September 1945. Terdapat partai lain yang tumbuh di Turki yaitu *Demokrat Parti* (Partai Demokrat). Partai Demokrat secara resmi terdaftar pada 7 Januari 1946.

Sebuah kongres luar biasa diadakan pada bulan Mei 1946. Kongres tersebut mengambil sebuah langkah liberalisasi di mana menyetujui adanya pemilu langsung dan jabatan ketua partai yang permanen dihapuskan demikian juga gelar

Milli Sef (pimpinan nasional). Tentu saja Ismet tetap sebagai ketua, namun kini Ismet harus dipilih kembali.

Pada kongresnya di bulan November 1947, PRR menyetujui adanya kebebasan berusaha dan memutuskan untuk mencabut kembali pasal 17 undang-undang distribusi tanah. Klimaks periode transisi terjadi dengan dilaksanakannya pemilu tanggal 14 Mei 1950. Hasil pemilu menunjukkan bahwa Partai Demokrat memenangkan 53,4% suara sedangkan PRR hanya 39,8%. Menurut sistem pemilihan di Turki, hal ini berarti bahwa PD 408 kursi di parlemen baru sedangkan PRR meraih 69 kursi.

Peningkatan suara partai demokrat terjadi pada tahun 2 Mei 1954. Peningkatannya terurai sebagai berikut:

Tabel 2.1⁴¹
Peningkatan Hasil Pemilu 1954 Partai Demokrat

Tahun	Partai Demokrat		Partai Rakyat Republik	
14 Mei 1950	53,6%	408	39,9%	69
2 Mei 1954	58,4%	503	35,1%	31

Pemilu tahun 1954 merupakan keberhasilan bagi Menderes. Namun pada tahun berikutnya, penurunan ekonomi secara perlahan mengikis dukungan dari partai demokrat. Pada Desember 1955 PD mengalami perpecahan hingga memunculkan Partai Kebebasan yang kemudian menjadi partai oposisi terbesar dalam majelis nasional. Selama tahun 1956 kecenderungan sistem politik di Turki otoritarianisme.

Pemilu tahun 1957 menunjukkan dukungan masyarakat kepada partai demokrat berkurang namun partai tersebut masih dapat mempertahankan

⁴¹ Erik J. Zürcher, *Sejarah Modern Turki*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003) , 292.

dukungan mayoritas warga pedesaan. Pada bulan Desember 1957, sembilan perwira angkatan darat ditangkap karena dianggap berkomplot menentang pemerintah. Penangkapan tersebut diumumkan kepada publik tanggal 16 Januari 2008. Partai Demokrat tidak percaya kepada angkatan bersenjata karena para perwiranya memiliki hubungan dekat dengan rezim lama khususnya dengan Ismet Pasha.

Pada 27 Mei 1960 militer melakukan kudeta, sebuah deklarasi yang dibacakan oleh Kolonel Alpaslan Turkes melalui radio pemerintah Turki pada pagi hari pukul 03.00. Kalangan militer mengumumkan bahwa kekuasaan kini berada di tangan Komite Persatuan Nasional (KPN) yang dipimpin Jenderal Gursel. Pada hari setelah kudeta Gursel diangkat menjadi kepala negara merangkap perdana menteri serta menteri pertahanan, yang secara teoritis berarti memberinya kekuasaan yang lebih absolut daripada kekuasaan yang pernah dimiliki Kemal.

Partai Keadilan meraih kemenangan dalam pemilu bulan Oktober 1965 dengan memperoleh mayoritas suara mutlak 52,9% dari kursi di majelis. PRR suaranya menjadi 28,7%, sedang semua partai lainnya meliputi Partai Nasional Petani Republik (PNPR), Partai Turki Baru (PTB), Partai Pekerja Turki (PPT), Partai Baru, Partai Bangsa memperoleh kurang dari 7% suara. Akhirnya Demirel menggantikan Menderes. Namun pada tanggal 12 September 1980, angkatan bersenjata Turki mengambil alih kekuasaan kembali.

3. Sistem Politik Turki Modern

Pada saat kudeta tahun 1980, militer merencanakan pemerintah Turki ke dalam sistem politik demokratis. Militer mengumumkan bahwa parlemen dan kabinet telah dibubarkan dan bahwa imunitas para anggota majelis nasional (parlemen) telah diakhiri. Majelis yang beranggotakan 160 orang mengadakan pertemuan pada tanggal 23 Oktober 1981. Anggota majelis diketuai oleh Profesor Orhan Aldikacti.

Dihasilkan sebuah draf yang menjelaskan bahwa pusat kekuasaan di tangan eksekutif dan menambah kekuasaan presiden serta dewan keamanan nasional. Pada tahun 1980 an partai Islam mulai berkembang di Turki dan Turki mengarah pada sistem politik yang demokratis.

Dari sudut pandang struktural, sistem politik demokrasi secara ideal ialah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan konsensus.⁴² Artinya demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan di antara individu, diantara berbagai kelompok, diantara individu dan kelompok, individu dan pemerintah, kelompok dan pemerintah, bahkan di antara lembaga-lembaga pemerintah.

⁴² Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 228.

BAB III

PROSES TERPILIHNYA ABDULLAH GUL

Pada bab ini akan membahas mengenai proses terpilihnya Abdullah Gul menjadi Presiden Turki, diawali dengan membahas sistem pemilu di Turki, dengan membahas pemilu Turki 2007 dan kemenangan Abdullah Gul.

A. Sistem Pemilu di Turki

Konstitusi Turki menetapkan pemilihan presiden ditentukan oleh anggota parlemen. Dan jika anggota parlemen tidak berhasil memilih presiden maka terjadi pembentukan parlemen baru. Dalam sistem pemilu Turki hanya partai yang berhasil mencapai suara 10% yang akan masuk parlemen. Pemilihan presiden Turki selanjutnya dilakukan oleh parlemen. Pemilihan presiden berlangsung dalam empat putaran. Apabila dalam pemilihan putaran pertama seorang capres mendapat 2/3 suara maka dia terpilih menjadi presiden. Apabila tidak, pemilihan putaran kedua harus dilakukan. Syarat terpilihnya presiden sama dengan putaran pertama.⁴³

Jika presiden tidak berhasil memilih presiden pada putaran kedua, pemilihan dilanjutkan pada putaran ketiga dan keempat. Calon presiden dapat terpilih jika mendapat sedikitnya 276 suara. Selanjutnya, konstitusi memerintahkan membentuk parlemen baru apabila anggota parlemen tidak berhasil memilih presiden.

⁴³ *Hasil Suara Pemilu*, (diakses pada hari Jum'at, 21 November 2008 pukul 17:00 WIB); melalui <http://www.turkishdailynews.com.tr/vote200/article.phpnewsid=51>

Pemerintah melakukan perubahan Undang-undang dasar yang mengizinkan rakyat, dan bukan parlemen, untuk memilih presiden maksimal untuk dua masa jabatan lima-tahun.⁴⁴

B. Pemilu Turki 2007

Pemilihan presiden Turki putaran pertama diselenggarakan pada hari Jum'at, 27 April 2007. Kubu sekuler menganggap sidang pemilihan presiden putaran pertama tidak sah karena tidak memenuhi kuorum, yakni 2/3 anggota parlemen atau sekitar 367 dari 550 orang.⁴⁵

Atas tuntutan militer dan Partai rakyat Republik (CHP), akhirnya hasil pemilihan presiden putaran pertama dibatalkan oleh Pengadilan Konstitusi (PK). Maka diadakan pemilihan ulang putaran pertama pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2007. Pemilihan inipun akhirnya gagal juga mencapai kuorum, ia memperoleh 337 suara atau kurang dari mayoritas 2/3 yang diperlukan untuk langsung menang. Dan kembali diboikot pihak oposisi. Maka sebagai konsekuensinya, pemerintah harus mempercepat pemilu yang seharusnya dilaksanakan pada November 2007 menjadi dilaksanakan tanggal 22 Juli 2007.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Dilema Demokrasi Turki Islam atau Sekularisme*, diakses pada hari Rabu, 5 September 2007 pukul 21:05 WIB, melalui <http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/periskop/dilema-demokrasi-turki-islam-atau-sekuler.html>.

Pemerintah Turki mengadakan pemilu lebih awal mengatasi krisis politik yang sedang terjadi di Turki karena adanya kegagalan parlemen dalam memilih calon presiden serta pemboikotan hasil pemilu oleh pihak oposisi.⁴⁶

Akhirnya pemilu Turki 2007 dilakukan secara langsung oleh rakyat dan berlangsung dalam empat putaran. Sekitar 42 juta orang berhak memberikan suara pada pemilu parlemen pemilihan presiden. Apabila akan memenangkan pemilihan maka calon presiden harus mendapatkan setidaknya 367 suara atau 2/3 suara dari total suara di parlemen. Terdapat 14 partai politik yang mengikuti pemilu 2007 dan 700 calon independent bersaing untuk mendapatkan kursi di parlemen yang beranggotakan 550 orang. Sebanyak 160.000 tempat pemungutan suara dibuka. Warga negara yang berusia 18 tahun keatas memiliki hak pilih. Partai politik yang memperoleh 10 persen suara seluruh negeri bisa memiliki kursi di parlemen. Perhitungan langsung dilakukan setelah tempat pemungutan suara (TPS) ditutup.

Selanjutnya tiga kandidat bersaing memperebutkan kursi presiden. Ketiga orang tersebut adalah Abdullah Gul dari partai AKP, Shobahuddin dari partai nasionalis, dan mantan menteri pertahanan, serta Husain Thoyafun dari partai sosialis. Gul mendapatkan suara mayoritas mutlak yaitu 276 suara dari total suara 339 suara.⁴⁷

Partai Politik Turki Tahun 2007 :⁴⁸

1. Partai Turki yang CeraH (Aydinlik Turkiye Partisi, ATP)
2. Partai Komunis Turki (Turkiye Komunist Partisi, TKP)

⁴⁶ *Pemilu kali ini di Turki*, (diakses 16 Desember 2007); melalui <http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=464>

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

3. Partai Demokrat (Demokrat Parti, DP)
4. Felicity Parti (Saadet Partisi, SP)
5. Partai Kebebasan Dan Perpaduan (Ozgurluk ve Dayanismak Partisi,ODP)
6. Partai Turki Bebas (Bagimsiz Turkiye Partisi, BTP)
7. Partai Pembangunan dan Keadilan (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP)
8. Partai Buruh (Emek Partisi, EP)
9. Partai Liberal Demokratik (Demokrat Yang Parti Liberal Partisi, LDP)
10. Partai Pergerakan Nasionalis (Milliyetci Hareket Partisi, MHP)
11. Partai Pendakian (Halkin Yukselisi Partisi, HYP)
12. Partai Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP)
13. Partai Buruh (Isci Partisi, IPETANG)
14. Partai Muda (Genc Parti, DOKTOR)

Pada bulan Mei sebelumnya, Abdullah Gul sebagai calon presiden dari partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) gagal meraih kursi kepresidenan lantaran upaya penggemosan yang dilakukan kalangan sekuler dan campur tangan kubu militer dalam proses pemilihan presiden. Penafsiran mahkamah konstitusi Turki terhadap batas kuorum anggota parlemen yang hadir dalam putaran pertama pemungutan suara, akhirnya mengubah situasi yang ada. Sehingga berhasil membatalkan putaran pertama pemungutan suara kali itu. Karenanya, PM Turki, Receb Tayeb Erdogan terpaksa mereaksinya dengan menggelar pemilu parlemen dini.

Hasil pemilu parlemen dini yang digelar pada tanggal 22 Juli 2007, diluar prediksi kalangan sekuler dan militer, partai Keadilan dan Pembangunan ternyata berhasil meraih hampir dari separuh suara keseluruhan. Kemenangan mutlak partai Keadilan dan Pembangunan sebagai parpol Turki berhaluan Islam ini semakin mengokohkan posisinya di kalangan rakyat Turki sekaligus sebagai unjuk kekuatan partai ini di kancah politik Turki. Dengan dukungan suara tersebut, para pemimpin partai Keadilan dan Pembangunan kembali memasang Abdullah Gul sebagai calon presiden baru. Hasil pemilu dini parlemen ini, terpaksa membuat kubu sekuler mengakhiri upaya penciptaan krisis politik yang digelarnya. Sementara itu, kehadiran dua partai sekuler, semacam partai Gerakan Nasional dan partai Demokrat Kiri serta partai rakyat demokratis Kurdi dan sejumlah politis independen dalam pemilihan presiden kali ini, mampu menggagalkan upaya boikot partai Republik Rakyat, pimpinan Deniz Baykal. Dalam pemilihan sebelumnya, partai ini pun merupakan salah satu aktor utama yang menciptakan krisis politik di Turki.

Dengan terpilihnya Abdullah Gul sebagai Presiden, tiga posisi utama kekuasaan Turki, yaitu presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen berada di tangan partai Keadilan dan Pembangunan, dengan kata lain, kekuasaan di negara ini telah didominasi oleh kekuatan partai Keadilan dan Pembangunan yang notabene berhaluan Islam. Munculnya situasi semacam ini, sejak dulu telah menjadi bahan kekhawatiran kalangan sekuler dan militer Turki. Para pengamat politik menilai, bisa jadi dua kalangan tersebut akan berupaya menciptakan krisis politik baru, sebagai upaya untuk melemahkan posisi partai Keadilan dan

Pembangunan. Apalagi, masyarakat Turki sekarang berharap begitu banyak terhadap partai ini.⁴⁹

Berbeda dengan acara pengambilan sumpah presiden Turki sebelumnya, pengambilan sumpah Abdullah Gul sebagai presiden baru Turki tidak dihadiri oleh para kepala angkatan bersenjata Turki. Kondisi ini dapat dimaklumi karena militer Turki adalah lembaga negara yang sangat mendukung sekularisme di negeri itu, dan sejak awal menentang pencalonan Gul yang dinilai sebagai figur yang Islami, ikut dalam pemilihan presiden di Turki.

Sikap militer tak berubah, meski Gul jelas mendapat dukungan mayoritas dalam voting di parlemen, pada tanggal 28 Agustus 2007, Jenderal Yasar Buyukanit, kepala angkatan bersenjata Turki mengisyaratkan ketidakmauannya mendukung pemerintahan Gul, meskipun Gul terpilih sebagai presiden.

Militer Turki menjadi batu sandungan pemerintahan Gul. Meskipun dalam tiap kesempatan Gul meyakinkan bahwa dirinya akan menghormati prinsip sekularisme yang dianut Turki. Surat kabar paling populer di Turki, Vatan menulis, "Langkah awal Gul tidak akan mudah. Setiap langkah yang dilakukannya akan dikritisi oleh institusi-institusi dan kelompok-kelompok masyarakat yang sensitif dengan sekularisme. Gul harus hati-hati dan melakukan upaya untuk menenangkan mereka."⁵⁰

Peran militer dalam perpolitikan di Turki memang besar. Militer Turki tercatat telah tiga kali melakukan kudeta dalam 50 tahun terakhir, yaitu tahun

⁴⁹ *Situasi Politik Baru Turki*, (diakses 7 Januari 2008); melalui http://indonesian.tribune.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

⁵⁰ *Militer Turki, Batu Sandungan Buat Gul* (diakses 7 Januari 2009); melalui <http://www.erasmusli.com/berita/int/7829095739-militer-turki-batu-sandungan-buat-gul.htm?rel>.

1960, 1971, dan 1980. Pada tahun 1997 mereka melakukan intervensi dengan menurunkan PM Turki pertama yang berasal dari basis partai Islam Necmettin Erbakan. Militer Turki bahkan menyatakan melarang Partai Erbakan, Partai Kesejahteraan pada tahun 1998. Partai Pembangunan dan Keadilan merupakan "perluasan" dari Partai Kesejahteraan.⁵¹

C. Kemenangan Abdullah Gul

Pemilihan umum parlemen Turki pada tanggal 22 Juli 2007, dimenangkan oleh *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP). Sebuah partai politik yang disebut-sebut sebagai partai yang membawa misi Islam. Padahal Turki adalah sebuah negara yang telah melakukan pengekan terhadap Islam sejak diproklamirkannya Turki sebagai negara sekuler oleh Mustafa Kemal pada tahun 1923 M. Kemenangan yang signifikan, dimana pada Pemilu ke-16 itu, *Justice and Development Party* atau Partai Keadilan dan Pembangunan ini mampu meraih suara mencapai 46.59%.⁵²

Terpilihnya Abdullah Gul sebagai presiden baru Turki akhirnya berhasil meredam krisis politik di negara ini yang sempat berkejolak selama empat bulan. Abdullah Gul sukses terpilih sebagai Presiden Turki yang kesebelas menggantikan Ahmet Necdet Sezer setelah melewati tiga tahap pungutan suara, dengan meraup suara mayoritas sebanyak 339 suara anggota parlemen. Berdasarkan konstitusi, presiden dipilih oleh parlemen maksimal dalam empat

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Kemenangan AKP dan Abdullah Gul*, diakses pada hari Jumat, 7 September 2007 pukul 13:05, melalui http://mygamis-isuantarabangsa.blogspot.com/2007/09/kemenangan-akp-dan-abdullah-gul_12.html.

putaran pungutan suara. Pada tahap awal dan kedua, perolehan dua per tiga suara anggota parlemen merupakan syarat lazim yang harus dipenuhi. Namun dalam tahap ketiga dan keempat, syarat yang dipatok cukup setengah plus satu dari keseluruhan suara sebanyak 550, yaitu sebanyak 276 suara.

Dengan terpilihnya Abdullah Gul sebagai Presiden, tiga posisi utama kekuasaan Turki, yaitu presiden, perdana menteri, dan ketua parlemen berada di tangan partai Keadilan dan Pembangunan, dengan kata lain, kekuasaan di negara ini telah didominasi oleh kekuatan partai Keadilan dan Pembangunan.⁵³

Sebuah kebangkitan politik yang tidak hanya mencengangkan negara-negara berpenduduk muslim, akan tetapi bagi Barat yang senantiasa mendukung gerakan modernisasi Turki. Islam politik mampu menggeliat di tengah kuatnya hegemoni sekularisme Kemalian. Padahal sekularisme gagasan Attaturk ini benar-benar telah membatasi aktifitas keagamaan rakyat Turki hingga ke simbol-simbolnya. Dimana, simbol-simbol Islam diminimalisir dari kehidupan publik. Perhatikan saja bagaimana kalangan sekuler secara sistematis mengahului bangkitnya kembali sisa-sisa kekuatan Islam politik Khilafah Islamiyah.

Kemenangan AKP dalam Pemilu Turki 2007 menunjukkan semakin kuatnya cengkraman partai berbasis Islam. Ini adalah kemenangan kedua setelah AKP memenangkan Pemilu 2002. Dengan demikian AKP yang dipimpin Recep Tayyip Erdogan adalah partai berbasis Islam yang mengukir prestasi paling gemilang sejak diproklamirkannya negara Turki modern. Padahal, AKP baru

⁵³ *Situasi Politik Baru Turki*, (diakses 7 Januari 2008); melalui http://indonesian.irib.ir/index.php?option=com_frontpage&itemid=1

didirikan pada bulan Agustus tahun 2001, usia yang sangat belia bagi sebuah partai politik.

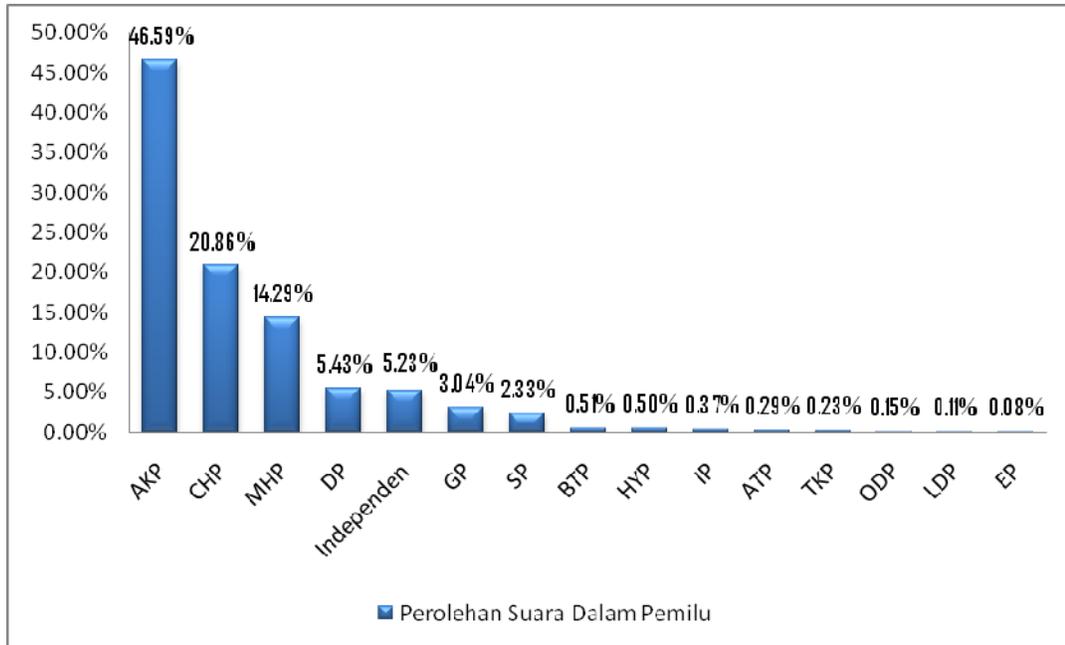
Kemenangan AKP menjadi bukti bahwa mayoritas rakyat Turki tidak terpengaruh oleh kampanye kalangan sekuler yang menuduhnya sebagai partai yang membawa misi menghancurkan sekulerisme. Sebelumnya, kaum pendukung sekularisme menuding Perdana Menteri Erdogan hendak merombak paham sekuler Turki dengan ideologi Islam. Namun, tuduhan itu dibantah oleh seorang profesor sosiologi dan pakar pergerakan Islam, Nilufer Gole. Ia mengungkapkan pembelaannya dengan mengatakan bahwa ini bukan Islamisasi, tetapi partai berideologi Islam membaaur dengan tradisi demokrasi. Ia merupakan keberhasilan sistem parlemen pluralis Turki dan dapat menjadi contoh evolusi sebuah pergerakan Islam radikal.⁵⁴

Namun apabila dicermati, ideologi dan basis gerakan AKP sesungguhnya berakar dari Refah Partisi atau Welfare Party atau Partai Refah. Partai ini memiliki basis pemilih muslim yang ingin kembali kepada syari'at Islam dan menentang sekulerisme. Akan tetapi, catatan keberhasilan partai-partai politik Islam di Turki belum mampu membawa perubahan yang signifikan. Partai-partai ini selalu mengalami pasang surut. Sebab, kemenangan demi kemenangan yang diraih selalu diikuti dengan pembubaran partai politik. Kecuali kehadiran rezim AKP yang mampu menghabiskan satu periode pemerintahan, memenangkan Pemilu kembali serta lolos dari guncangan manuver politik kalangan sekuler dan

⁵⁴ *Ibid.*

tidak dibubarkan sebagaimana partai-partai politik sebelumnya. Inilah wujud dari bangkitnya Islam politik di Turki.

1. Grafik Perolehan Suara :⁵⁵

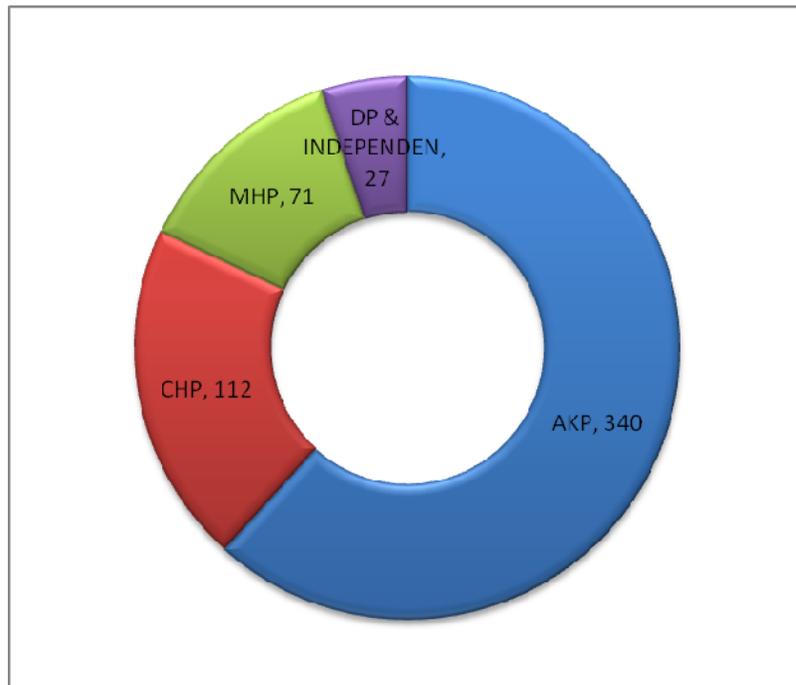


Grafik perolehan suara diatas adalah hasil pemilu langsung yang dilaksanakan tanggal 22 juli 2007 lalu. Data tersebut dikumpulkan dari 160.000 tempat pemungutan suara. Sekitar 42 juta orang berhak memilih partai untuk pemilu ini. Dari data diatas dapat diketahui hasil suara terbanyak didapatkan Partai Keadilan Pembangunan yaitu dengan presentase 46.59%, dan jauh dibawahnya dengan perolehan suara 20.86% yaitu Partai Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), dan Partai Pergerakan Nasionalis (Milliyetci Hareket Partisi,

⁵⁵ Hasil Suara Pemilu, diakses pada hari Jum'at, 21 November 2008 pukul 17:00 WIB melalui <http://www.turkishdailynews.com.tr/vote200/article.phpnewsid=51>

MHP) mendapatkan 14.29% suara. Sedangkan Partai demokrat (Demokrat Parti) mendapat 5.43% suara jumlah ini berselisih sedikit dengan Independen berjumlah 5.23% suara. Dan partai-partai lainnya hanya mendapatkan persentase dibawah 5 %.

2. Data Perolehan Kursi di parlemen :⁵⁶



Dari data persentase suara dalam pemilu 2007 di Turki, Didapatkan data perolehan kursi di parlemen. Partai AKP dengan hasil suara 46.59% mendapatkan 340 kursi di parlemen, Partai Republik (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) dengan perolehan suara 20.86% mendapat 112 kursi, Partai Pergerakan Nasionalis (Milliyetci Hareket Partisi, MHP) dengan 14.29% suara mendapat 71 suara.

⁵⁶ *Ibid.*

Sedangkan Partai demokrat (Demokrat Parti) yang mendapat 5.43% dan Independen berjumlah 5.23% suara mendapat 27 kursi di parlemen.

Selanjutnya tanggal 28 Agustus 2007 tiga kandidat bersaing memperebutkan kursi presiden. Ketiga orang tersebut adalah Abdullah Gul dari partai AKP, Shobahuddin dari partai nasionalis, dan mantan menteri pertahanan, serta Husain Thoyafun dari partai sosialis. Gul mendapatkan suara mayoritas mutlak yaitu 339 suara dari total suara 550 anggota parlemen. Dia menyingkirkan dua pesaingnya, Shobahuddin yang hanya mendapat 70 suara dan Husain Thoyafun 13 suara.⁵⁷

Jumlah perolehan suara anggota parlemen keseluruhan hanya 422 suara, berarti yang tidak memilih atau abstain sebesar 128 suara. Berdasarkan konstitusi, presiden dipilih oleh parlemen maksimal dalam empat putaran pungutan suara. Pada tahap awal dan kedua, perolehan dua per tiga suara anggota parlemen merupakan syarat lazim yang harus dipenuhi. Namun dalam tahap ketiga dan keempat, syarat yang dipatok cukup setengah plus satu dari keseluruhan suara sebanyak 550, yaitu sebanyak 276 suara. Dan Gul memenuhi persyaratan tersebut dengan memperoleh 339 suara. Perolehan suara tersebut membawa Gul menjadi presiden Turki kesebelas menggantikan Ahmet Necdet Sezer. Dan dilantik pada hari yang sama yaitu tanggal 28 Agustus 2007.

⁵⁷ *Pemilu kali ini di Turki*, (diakses 16 Desember 2007); melalui <http://www.forum-politisi.org/berita/article.php?id=464>.

BAB IV
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMENANGAN
ABDULLAH GUL DALAM PEMILU 2007

Pada bab IV ini membahas mengenai AKP mencalonkan Abdullah Gul, kemudian membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam Pemilu. Dua faktor yang mempengaruhi kemenangan Abdullah Gul dalam pemilu 2007 akan dijelaskan secara terperinci. Pertama yaitu isu utama yang diangkat Gul dalam kampanyenya yaitu berkaitan dengan pengintegrasian negara Turki menuju anggota Uni Eropa, diawali dengan awal pengintegrasian negara Turki dengan Uni Eropa dan Upaya yang telah ditempuh, serta membahas bagaimana figur Abdullah Gul yang kharismatik yang diyakini pemilih adalah figur pemimpin yang baik, berisikan profile Abdullah Gul.

A. AKP Mencalonkan Abdullah Gul

AKP mengajukan calon Abdullah Gul untuk pemilihan presiden Turki. Abdullah Gul dianggap oleh AKP akan mampu membawa Turki pada pembaharuan karena Gul adalah seorang muslim yang nasionalis dan memiliki kepribadian yang dianggap mampu untuk mengakomodir kepentingan berbagai pihak.

Parlemen Turki pada akhirnya menetapkan untuk memilih Menteri Luar Negeri, Abdullah Gul, sebagai presiden menyusul berbulan-bulan terjadi ketegangan, dan menjadikannya sebagai tokoh Muslim pertama sebagai kepala

negara dalam sejarah republik sekuler itu. Gul yang pada saat terpilih berusia 56 tahun dipastikan mengamankan kemenangan dalam putaran ketiga pemilihan di mana pemenangnya membutuhkan mayoritas tipis dengan 276 suara dari 550 anggota parlemen.

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa dipastikan secara mudah melewati rintangan dengan 340 kursinya, setelah turun sedikit dari dua per tiga perolehan mayoritas untuk memilih presiden dalam dua putaran pertama pemilihan. Pemilihan Gul akan menjadi kemenangan telak bagi partai Islam AKP melawan kekuatan sekularis dukungan militer angkatan darat yang memboikot pencalonan presiden oleh Gul pada April silam karena dasar pijakannya adalah Islam.

Para oposisi menuduh bahwa AKP, partai Islam moderat yang sebelumnya dilarang, memiliki agenda rahasia untuk merubah negara sekuler Turki menjadi negara model rezim Iran dan akan bebas menerapkan rencananya ketika Gul telah menduduki jabatan presiden. Kaum sekuler garis keras juga menentang istri Gul yang memakai jilbab, busana Muslimah, yang dinilai sebagai simbol perongrongan atas sistem sekuler.

Kepala Staf Angkatan Darat, yang memainkan peranan besar dalam memboikot pencalonan Gul untuk posisi presiden, memperingatkan adanya "pusat kejahatan" yang berkeinginan meruntuhkan rezim konstitusional negara. "Negara kita sedang menyaksikan kelakuan pusat kejahatan yang berupaya secara sistematis merongrong struktur sekuler negara," kata Yasar Buyukanit dalam pesan tertulisnya. Angkatan Darat Turki tidak akan dihalangi oleh serangan

demikian," katanya, "Pasukan Angkatan Darat tidak akan membuat konsesi apapun, dalam kewajibannya mengawal Republik Turki, suatu negara sekuler berbasis pada hukum dan undang-undang."

Ketika Gul mengajukan pencalonannya pada April 2007, oposisi memboikotnya, sementara militer, yang telah menumbangkan empat pemerintahan sejak 1990, memperingatkan bahwa pihaknya telah siap mempertahankan perintah sekuler itu. Krisis tersebut memaksa Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan untuk menyerukan pemilu dini pada 22 Juli 2007 yang kemudian dimenangkan secara telat oleh AKP.

AKP telah berulang kali membantah bahwa pihaknya berupaya membongkar sistem negara sekuler dan Gul juga telah menjanjikan komitmennya untuk membedakan antara negara dan agama. Gul juga berjanji untuk mengayomi seluruh masyarakat Turki bila terpilih sebagai presiden, demikian laporan AKP.⁵⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa AKP mengajukan Abdullah Gul untuk menjadi presiden Turki. Gul selanjutnya menerima AKP sebagai "kendaraan politiknya" untuk menduduki kepresiden Turki. *Background* Gul yang muslim membuat kelompok sekuler takut Gul akan mengubah negara Turki yang sekuler menjadi negara Islam. Hal tersebut mengakibatkan perjuangan Gul menjadi presiden mendapat banyak hambatan dari kelompok sekuler. Namun pada akhirnya Abdullah Gul berhasil meyakinkan masyarakat bahwa dirinya

⁵⁸ *Runtuhnya Sekularisme di Turki*, (diakses pada hari rabu, 3 September 2008 pukul 17:00 WIB) melalui <http://smsplus.blogspot.com/2007/08/runtuhnya-sekularisme-di-turki.html>.

adalah orang yang tepat untuk menjabat sebagai presiden Turki, dan berakhir dengan terpilihnya Gul sebagai presiden Turki.

B. Kemampuan Gul Memilih Isu untuk Kampanye

Gul terpilih dalam pemilihan presiden di Turki 2007 dengan 339 suara di parlemen yang memiliki 550 kursi dalam pemungutan suara tahap ketiga. Sebelumnya, Gul gagal memperoleh dua-pertiga suara yang diperlukan untuk menang dalam dua kali pemungutan suara sebelumnya. Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyambut baik terpilihnya Gul dari Partai Keadilan dan Pembangunan yang memerintah itu. Barroso mengatakan ini dapat membantu mempercepat upaya Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa.⁵⁹

Saat Gul menjabat sebagai menteri luar negeri Turki, Gul dikenal dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara AS dan juga Uni Eropa. Hubungan baik tersebut terbukti dengan kunjungan yang pernah dilakukan Gul ke AS dan Uni Eropa serta sebaliknya. Gul menganggap tanpa adanya dukungan dari Negara lain termasuk AS dan Uni Eropa maka sulit bagi Turki untuk mencapai kemajuan secara cepat.

Isu pengintegrasian Turki menuju anggota Uni Eropa, diangkat Gul dalam kampanye. Gul menjelaskan kepada masyarakat bahwa penting bagi Turki untuk masuk dalam Uni Eropa. Berbagai keuntungan akan diperoleh Turki dengan bergabung dalam Uni Eropa, yaitu selain kesejahteraan ekonomi (*economy well being*) juga keamanan (*security*). Ekonomi Turki diharapkan akan meningkat

⁵⁹ *Abdullah Gul Dilantik Sebagai Presiden Baru Turki*, (diakses pada hari Senin, 2 Juni 2008 pukul 14:00 WIB); melalui <http://www.voanews.com/indonesian/archive/2007-08/2007-08-28-voa9.cfm?CFID=221231395&CFTOKEN=76801217>.

apabila bergabung dengan Uni Eropa karena intensitas kerjasama dibidang ekonomi akan terwujud. Selain itu, ada upaya saling melindungi antar anggota Uni Eropa sehingga membuat posisi Turki menjadi lebih aman dari gangguan negara lain.⁶⁰

Dipahami bahwa antara anggota Uni Eropa terjalin kerjasama untuk saling memajukan anggotanya sehingga akan membawa keuntungan bagi Turki apabila mampu untuk menggabungkan diri dengan Uni Eropa.

C. Figur Abdullah Gul yang Kharismatik

1. Kemampuan Abdullah Gul sebagai Muslim yang Nasionalis

Abdullah Gul lahir di Kayseri, 29 Oktober 1950. Ayah Abdullah Gul bernama Ahmet Hamdi, seorang imam berdarah Turki dan Arab. Ibunya bernama Adviye yang berasal dari keluarga Islam konservatif. Apabila ditinjau dari garis keturunan Abdullah Gul, maka dapat diketahui bahwa Gul seorang yang berasal dari Arab, nenek dan kakek Abdullah Gul berhijrah dari Siirt ke Develi sekitar tahun 1915. Gul dipanggil juga dengan nama Cumhur, oleh keluarganya. Berbagai media juga mengekspos bahwa isterinya Abdullah Gul memakai jilbab yang merupakan pakaian Islam dan jelas dilarang di Turki.⁶¹

⁶⁰ *Ber-Islam ala Turki*, (diakses pada hari Sabtu, 7 Juni 2008 pukul 17.00 WIB); melalui <http://saidiman.wordpress.com/2007/>.

⁶¹ *Abdullah Gul*, (diakses pada hari Kamis, 11 September 2008 pukul 16:00 WIB); melalui http://209.85.175.104/search?q=cache:07Rc3xJ4UK4J:indonesian.irib.ir/index2.php%3Foption%3Dcom_content%26do_pdf%3D1%26id%3D98+kudeta+yang+dilakukan+militer+turki&hl=en&ct=clnk&cd=6

Partai Keadilan dan Pembangunan yang berkuasa di Turki sebelum pemilihan yang terjadi di Turki tahun 2007, telah mencalonkan Menteri Luar Negeri Turki, Abdullah Gul untuk menjabat sebagai Presiden Turki. Tindakan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Recep Tayyip Erdogan tersebut sempat menimbulkan kembali tentangan dari kelompok sekular dan tentera Turki yang begitu tunduk dengan ide nasionalis Mustafa Kamal Atatürk. Kelompok sekular tidak berkeinginan Abdullah Gul menjadi Presiden Turki karena Gul dilihat sebagai seorang yang Islamik, pendirian yang bertentangan dengan sekular dan kondisi tersebut dianggap akan memundurkan Turki.

Abdullah Gul menjalani kuliah di Universiti Istanbul, Turki dan mengambil jurusan ekonomi. Abdullah Gul kemudian belajar di London dan Exeter. Setelah lulus, Gul kemudian bekerja di Adapazan, sebagai pengajar dalam bidang ekonomi di Universiti Sakarya. Pada tahun 1983 hingga 1991, Abdullah Gul bekerja di Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*). Kemudian pada tahun 1991, Gul menjadi Menteri Luar Negeri Turki yang melakukan kegiatan mengurus hubungan antara Turki dengan bangsa lain. Semasa di universitas, Abdullah Gul terlibat dalam gerakan Islamiah-nasionalis yang dikenal dengan nama 'Milli Turk'.⁶²

Berdasarkan garis keturunan atau silsilah dari Abdullah Gul dapat diketahui bahwa Gul berasal dari keluarga yang memiliki *background* muslim. Abdullah Gul memiliki darah Arab dan juga dididik oleh kedua orang tuanya

⁶² *Ibid.*

yang aktif dalam kegiatan umat Islam, utamanya ayah Gul yang menjadi imam masjid di Turki. Hal yang wajar apabila Abdullah Gul menjadi seorang muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agama Islam.

Aktivitas Abdullah Gul menunjukkan bahwa Gul secara tegas menetapkan dirinya sebagai muslim yang berperan aktif dalam kegiatan umat Islam, dilihat dari keterlibatan Gul saat kuliah dalam Milli Turk dan tempatnya dahulu bekerja yaitu *Islamic Development Bank*. Abdullah Gul nampaknya tidak segan menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim meskipun umat Islam mendapat banyak tantangan dari kelompok sekuler di Turki. Keberanian Abdullah Gul dalam menunjukkan identitas muslimnya antara lain adalah memiliki seorang istri yang kesehariannya mengenakan jilbab dimana jilbab merupakan pakaian yang dilarang di Turki.

Walaupun Abdullah Gul seorang yang beragama Islam namun Gul bersikap nasionalis. Hal itu terlihat dalam kampanye yang dilakukan Gul sering mengajak masyarakat untuk tidak saling membeda-bedakan agama. Berikut salah satu pernyataan Abdullah Gul pada saat kampanye:

“Saya merasa setiap orang bebas memilih dan beribadah sesuai dengan agamanya. Jadi, meskipun saya adalah seorang muslim maka secara tegas saya menyatakan saya tidak akan menekan keberadaan agama lain. Tujuan masyarakat Turki adalah memajukan Turki, untuk itu marilah bersatu untuk mewujudkannya.”⁶³

⁶³ *Turki Tahan Dua Mantan Jenderal Karena Terlibat Usaha Kudeta*, (diakses pada hari rabu, 4 Juni 2008 pukul 13:10 WIB); melalui <http://www.antara.co.id/arc/2008/7/6/turki-tahan-dua-mantan-jenderal-karena-terlibat-usaha-kudeta/>.

Pernyataan tersebut tentu saja membuat perasaan nyaman pada diri masyarakat Turki apabila Abdullah Gul terpilih menjadi presiden. Figur Gul semakin dikenal saat Gul menyatakan pentingnya penghormatan hak asasi manusia di Turki. "Demokrasi, di mana sistem hak asasi manusia, kebebasan, dan sekularisme yang ada di dalamnya merupakan salah satu prinsip mendasar republik kita, merupakan model yang menopang kebebasan bagi berbagai gaya hidup yang berbeda-beda sebagaimana hal ini merupakan sebuah aturan harmoni sosial," kata Gul. Gul juga berjanji akan mengupayakan kesetaraan gender dan penegakan hukum. Gul mengatakan, "perubahan dan keberagaman" bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Adanya figure Gul yang mendukung penerapan hak asasi manusia utamanya agama serta kesetaraan gender menarik banyak kalangan di Turki untuk memilihnya.⁶⁴

Gul dikenal oleh banyak kalangan sebagai seorang muslim yang taat, dan merupakan presiden pertama Turki dengan latar belakang Islam. Namun Gul berjanji akan menegakkan tradisi sekuler Turki yang kuat, yang memisahkan pemerintah dengan agama. Adanya *background* Islam dalam diri Gul tidak membuat Gul mengedepankan kepentingan agamanya sehingga kekhawatiran beberapa pihak yang menuduh Gul berorientasi pada Islam tidak terbukti.

Sikap Abdullah Gul yang nasionalis lainnya juga ditunjukkan dari bagaimana Gul menghormati agama lain dengan tidak pernah menghina dan sering menyatakan perasaan suka citanya mendapatkan kritikan dari beberapa orang yang tidak menyukai Abdullah Gul dengan memiliki *background* agama

⁶⁴ *Ibid.*

lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Abdullah Gul adalah seorang muslim yang taat dan mempunyai sikap nasionalisme yang tinggi tanpa membeda-bedakan agama. Kondisi itu menjadikan figur Abdullah Gul sebagai figur yang memiliki nilai positif dalam pandangan masyarakat Turki.

2. Kemampuan Abdullah Gul Bersikap Positif terhadap Kelompok yang Menekannya

Figur Abdullah Gul tersebut banyak dianggap oleh masyarakat Turki sebagai tokoh yang karismatik. Abdullah Gul yang merupakan mantan menteri luar negeri itu terpilih sebagai presiden di tengah kontroversi soal sekularisme di Turki. Abdullah Gul berhasil memenangkan kursi kepresidenan, pada hari Selasa 28 Agustus 2007. Gul berasal dari AKP yang berbasis Islam. Kemenangan itu diraih Gul setelah berbulan-bulan terjadi konfrontasi melawan kekuatan sekuler. Meskipun banyak masyarakat yang menganggap Gul cenderung berorientasi Islam, Gul tetap menyanjung gagasan bahwa Islam dan negara perlu dipisahkan. Gul juga berjanji akan bersikap imparisial (tidak memihak) ketika memegang jabatan sebagai Presiden Turki.⁶⁵

Terlepas dari komitmen Gul untuk memisahkan antara Islam dengan negara, sinyalemen ketegangan masih tetap terlihat. Sejumlah jenderal militer pendukung sekularisme terlihat tidak menghadiri upacara pengambilan sumpah Abdullah Gul di parlemen, yang kini menjadi presiden sekaligus panglima

⁶⁵ *Ibid.*

tertinggi mereka. Media-media setempat menginterpretasikan ketidakhadiran para pembesar militer tersebut merupakan protes terhadap Gul. Sejak awal pencalonan Gul sebagai presiden, diblok oleh kubu oposisi sekuler, yang mencakupi baik militer maupun pengadilan tinggi.

Walaupun Gul banyak mendapat tantangan, namun Gul menunjukkan sikap positif dengan tidak memusuhi orang-orang yang menghalanginya untuk meraih jabatan presiden. Hal tersebut pada akhirnya banyak membuat masyarakat Turki menjadi simpatik pada figur Gul. Gul dikenal sebagai seorang Muslim taat yang juga salah satu arsitek pencalonan diri Turki sebagai anggota Uni Eropa dengan menggerakkan reformasi, menerima dukungan mayoritas dari 339 suara dalam pemungutan suara di parlemen yang beranggotakan total 550 kursi di Ankara. Kemenangan Gul itu sendiri sebelumnya sudah dipastikan oleh AKP yang berhasil memenangkan periode kepemimpinan ke-2 dalam pemilu bulan Juli 2007. Tetapi Gul, pria berbadan besar dan tegap yang juga dikenal ramah, dan sopan, cenderung bersikap berhati-hati karena banyak rakyat Turki yang menuding Gul memiliki agenda Islam tersembunyi.⁶⁶

Abdullah Gul menunjukkan sikap positif terhadap militer maupun pengadilan tinggi yang telah banyak diketahui oleh masyarakat selalu menentang keberadaan Gul. Sikap tersebut membuat masyarakat simpatik karena jarang orang dapat bersikap baik terhadap seseorang yang telah menghina atau menentangnya. Semakin kerasnya kelompok sekuler dan militer menekan

⁶⁶ *Abdullah Gul Jadi Presiden Turki*, (diakses tanggal 5 Juni 2008); dalam <http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/29/Internas/int01.htm>.

Abdullah Gul dan ditanggapi secara baik oleh Gul membuat masyarakat menyukai dan mengagumi Gul dengan sikapnya tersebut.

Meskipun dikecam kubu militer, Gul tidak pernah mengajukan kecaman atau tantangan terhadap militer. Termasuk dalam pidato yang dilakukan Gul saat mendapatkan kemenangan dalam pemilihan Presiden, Gul bersikap baik terhadap militer. Gul memuji militer sebagai alat pertahanan yang dibutuhkan sekaligus merupakan simbol kedaulatan. Pernyataan itu Gul sampaikan satu hari setelah komandan militer, Jenderal Yasar Buyukanit, memperingatkan bahwa "poros kejahatan" tengah berkomplot untuk menghancurkan prinsip-prinsip sekuler yang telah ditanamkan hampir seabad lalu oleh Mustafa Kemal Ataturk, bapak bangsa Turki. Militer Turki telah berhasil mengusur empat pemerintahan sejak 1960. Pencalonan awal Gul sebagai presiden terganjal militer akibat kekhawatiran bahwa Gul bakal menghancurkan tradisi-tradisi sekuler di Turki. Sikap Gul yang tidak membalas tekanan militer semakin membuat banyak orang yang mengaguminya sebagai seorang yang bijaksana dan patut diteladani. Di saat Gul mengucapkan sumpah jabatannya sebagai presiden, Gul juga menekankan bahwa dirinya berjanji akan netral dan tidak akan menekan kaum sekularis Turki, termasuk militer, dan kelompok atau unsur-unsur agama di Turki.

Dipahami bahwa Gul terus melakukan lobi terhadap kelompok yang menekannya dengan menunjukkan sikap positif dalam setiap kampanyenya. Hal tersebut tentu saja menarik perhatian para anggota parlemen, sehingga Gul mendapatkan suara yang mayoritas dalam parlemen.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa Abdullah Gul bersikap positif terhadap kelompok yang menekannya. Kecaman yang dilakukan para kelompok sekuler baik dari militer maupun pengadilan tinggi tidak membuat Gul memusuhi keduanya. Gul senantiasa menunjukkan sikap bersahabat kepadanya dengan cara tetap menghormati pendapat dari kelompok sekuler dan tidak mengancam tindakan yang telah dilakukan kelompok tersebut. Masyarakat menjadi simpatik terhadap sikap yang dilakukan oleh Abdullah Gul sebab sulit bagi manusia pada umumnya untuk tetap bersikap positif terhadap seseorang atau kelompok yang telah mengancamnya. Sikap positif Abdullah Gul pada akhirnya membuat rakyat Turki merasa Abdullah Gul adalah sosok yang layak untuk menjadi pemimpin Turki.

3. Kemampuan Abdullah Gul dalam Menjalim Hubungan dengan Negara Lain

Abdullah Gul merupakan Presiden Republik Turki ke-11. Sebelumnya Gul menyanggah jabatan sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri bagi Republik Turki. Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan telah memilih Gül sebagai calon presiden yang dianggap paling sesuai bagi Republik Turki bagi era milenium ini. Dipahami bahwa selama menjadi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri bagi Republik Turki, Abdullah Gul telah berusaha menjalin hubungan baik negara lain seperti negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS).

Gul mendekati AS dan karena begitu dekatnya dengan AS maka Gul pernah dilihat sebagai “boneka” AS bagi mereka yang pro Kemalist. Abdullah

Gul berusaha memberikan dukungan kepada AS sehingga AS juga secara nyata bersedia memberi dukungan kepada Gul. Abdullah Gul juga berusaha mendekatkan Turki dengan Kesatuan Eropah yang tindakan tersebut sering dikritik oleh kelompok nasionalis.

Kemampuan Abdullah Gul dalam menjalin hubungan dengan negara AS ikut mensukseskan terpilihnya Gul sebagai presiden di Turki. AS dan Kesatuan Eropa memberikan dukungan kepada Gul melalui media massa. Figur Abdullah Gul yang positif terus diekspos oleh media massa sehingga tidak hanya masyarakat Turki yang mengetahui sisi positif Gul namun juga masyarakat internasional. Selain itu, kelompok AKP yang merupakan kelompok pendukung Abdullah Gul juga ikut diekspos oleh media massa. Berbagai kegiatan yang dilakukan dipublikasikan dan karena Abdullah Gul tidak pernah melakukan perlawanan terhadap kelompok lain yang tidak mendukung Gul, maka AKP yang berperan melakukan *counter* balik terhadap segala informasi yang dapat mengakibatkan kredibilitas Gul menjadi buruk.⁶⁷

Keberhasilan Abdullah Gul mendekati AS terbukti dengan dukungan AS apabila Turki menyerang Kurdistan Irak. Media massa menyatakan, bahwa pemerintah Turki telah mendapat persetujuan Amerika Serikat, agresor Irak, termasuk Kurdistan Irak, yaitu persetujuan untuk melakukan aksi militer di utara Irak (Kurdistan Irak). Ini diperkuat oleh sumber-sumber resmi Turki dan AS. Meski keamanan wilayah Irak yang masih dalam pendudukan, termasuk

⁶⁷ *Aksi Militer Turki di Utara Irak*, (diakses tanggal 7 September 2008); dalam <http://konsultasi.wordpress.com/2008/03/24/aksi-militer-turki-di-utara-irak/>

Kurdistan, sebenarnya merupakan tanggung jawab AS, namun AS mengizinkan Turki melakukan aksi militer terhadap Kurdistan Irak.⁶⁸

Diketahui bahwa Irak adalah daerah yang diduduki oleh AS. Memang benar, bahwa serangan dari pihak luar ke Irak, dalam beberapa hal tampaknya merupakan serangan terhadap AS. Konsekuensinya, wajar jika Amerika tidak akan mentolerir negara manapun melancarkan perang terhadap Irak selama Amerika masih mendudukinya.

Pemerintah AS memberikan toleransi kepada pemerintah Turki untuk melancarkan aksi militer di wilayah utara Irak, karena adanya kedekatan antara Abdullah Gul dengan AS. AS sebenarnya memiliki kepentingan terhadap situasi tersebut. Sejak Amerika melepaskan diri dari komitmennya dengan Abdullah Ocalan, dan berhasil mendapatkan pemerintah Turki sesuai dengan kesepakatan terkenal yang dilakukan Amerika dengan Turki untuk membendung Rusia, kemudian setelah Partai Keadilan berhasil meraih tampuk pemerintahan di Turki, maka strategi Amerika, dan selanjutnya strategi Partai Keadilan adalah penanganan masalah Kurdi sebagai masalah politik.

Setelah Abdullah Gul menjadi presiden maka mulailah dilakukan berbagai pembahasan dan kunjungan para pejabat pemerintahan Turki ke daerah-daerah Kurdi Turki. Itu diikuti dengan pembicaraan kebudayaan seputar berbagai

⁶⁸ *Perjuangkan Jilbab Partai Berkuasa Turki Kemungkinan Dibubarkan*, (diakses tanggal 4 September 2008); dalam <http://www.eramuslim.com/berita/int/8519132131-perjuangkan-jilbab-partai-berkuasa-turki-kemungkinan-dibubarkan>.

program dengan menggunakan bahasa Kurdi di media-media massa. Sedangkan para pejabat tinggi militer yang loyal kepada Inggris, terus saja menangani masalah Kurdi sebagai masalah keamanan. Para pejabat tersebut mengeksploitasi masalah Kurdi di depan pemerintah Partai Keadilan. Itu dilakukan setiap kali melihat dukungan terhadap pemerintahan Erdogan bertambah berat dan berikutnya pengaruh Amerika di Turki juga semakin meningkat melebihi pengaruh kaum Sekuler Inggris yang ada di tubuh militer.

Militer ternyata terus berusaha menjatuhkan Gul. Militer sengaja mengeksploitasi keamanan militer dalam masalah Kurdi, khususnya sayap Partai Buruh Kurdistan yang memiliki basis di utara Irak. Sayap partai tersebut sengaja menggunakan aksi militer. Sayap ini tidak hanya menggunakan aktivitas politik untuk menyelesaikan masalah Kurdi di Turki. Sayap Partai Buruh Kurdistan yang ada di utara Irak memiliki hubungan dengan Barzani yang di belakangnya adalah Inggris. Dengan begitu Gul ditentang kaum Sekuler militer Inggris di Turki dari aspek mobilisasi keamanan militer untuk masalah Kurdi. Pada saat sama, Jalal Talabani dan partainya, loyal kepada Amerika. Karena itu, sayap Partai Buruh Kurdistan ada di wilayah utara yang berbatasan dengan wilayah Barzani bukan di wilayah Talabani.

Dengan aksi militer tersebut, maka militer Turki berkeinginan merusak hubungan pemerintah Partai Keadilan dengan Amerika Serikat yang menduduki Irak. Militer melakukan aksi militer terhadap Partai Buruh Kurdistan di Irak (Kurdistan). Aksi militer tersebut diharapkan akan mempengaruhi hubungan

Amerika dengan Partai Keadilan. Setiap kali terjadi perluasan aksi militer, maka setiap kali pula hubungan Amerika dengan Turki diharapkan mengalami keretakan, yaitu memperlemah pemerintahan Partai Keadilan.

Atas dasar itulah, maka kaum sekuler Inggris dari para komandan militer berusaha untuk terus melemahkan kedekatan antara Abdillah Gul dengan AS. Militer mengirimkan patroli infanteri atau dengan peralatan ringan tanpa perlindungan memadai (seperti yang terjadi pada akhir tahun 2007). Militer mengirimkan patroli tersebut ke tapal batas, berdekatan dengan wilayah Partai Buruh Kurdistan di Irak. Aktivitas itu telah menyebabkan terbunuhnya dan ditawannya sejumlah anggota pasukan Turki. Setelah itu, mulailah suara-suara pers militer membesar-besarkan apa yang terjadi, bahwa seolah hal itu merupakan penghinaan kepada militer. Bahwa wajib dilakukan aksi militer yang luas di utara Irak untuk memukul basis-basis Partai Buruh. Indikasi yang dekat adalah pernyataan tuduhan kepada pemerintah Partai Keadilan, bahwa Partai Keadilan tidak menghargai darah tentara yang tewas dan tentara yang tertawan. Hal itu menciptakan opini umum untuk mendukung serangan ke benteng-benteng Partai Buruh di Irak. Kemudian itu juga merupakan kritik terhadap kegagalan pemerintah Abdullah Gul.

Pemerintah mulai berupaya menanggukhan masalah tersebut. Namun, karena suara-suara seputar pasukan yang tewas dan tertawan itu semakin terdengar, ditambah apa yang terjadi, baik yang direkayasa maupun benar-benar terjadi di beberapa daerah yang berbeda, yang mengakibatkan pembunuhan

tersebut kepada Partai Buruh, kesemuanya menjadikan pemerintah harus bergerak. Pemerintah pun mengajukan undang-undang kepada parlemen dan disetujui. Undang-undang itu menyatakan persetujuan atas digelarnya aksi militer pada waktu yang tepat menurut pandangan pemerintah.

Ini merupakan persetujuan meski tidak bersifat tegas. Karena undang-undang tidak menetapkan waktu tertentu, tetapi menyerahkan pemilihan waktu itu kepada pandangan pemerintah kapan dipandang sebagai waktu yang tepat. Kaum Sekuler Inggris di tubuh militer memandang, bahwa aksi militer yang luas di Kurdistan Irak yang diduduki oleh Amerika, akan menyebabkan krisis panas bagi pemerintah Partai Keadilan dengan Amerika, jika pemerintah setuju terhadap intervensi militer ke Irak. Namun, jika pemerintah tidak setuju atas intervensi militer ke Irak supaya tidak berbenturan dengan Amerika, maka krisis panas akan terjadi pada pemerintah di hadapan opini umum Turki, karena terprovokasi dengan darah tentara. Dalam dua kondisi tersebut, para komandan militer yang loyal kepada Inggris dan mereka yang menilai diri mereka sebagai penjaga Kemalis Inggris memandang bahwa dalam dua kondisi seperti ini akan terjadi “krisis panas” bagi pemerintah Partai Keadilan.

Hanya saja, kunjungan terakhir Erdogan ke Amerika dan diikuti dengan pertemuan politik di Ankara dan di markas militer Amerika di Baghdad, telah menciptakan kesepakatan bahwa Amerika mengizinkan pemerintah Turki melakukan aksi militer terbatas, baik waktu maupun tempatnya. Pemerintah memperlihatkan bahwa dia tidak rela. Pemerintah memperlihatkan tidak dapat

menerima hilangnya pasukan dengan sia-sia. Pada saat yang sama, pemerintah bertindak membatalkan secara final rencana para komandan militer yang loyal kepada Inggris.

Pada tanggal 1 Juli 2008, polisi Turki menahan dua mantan jenderal, seorang pengusaha terkemuka dan seorang wartawan senior, beberapa jam sebelum pemeriksaan pertama satu kasus terhadap Partai AK yang memerintah, kata kantor berita Anatolia, seperti dikutip Reuters. Lembaga-lembaga siaran Turki mengatakan kasus itu mungkin terkait dengan satu pemeriksaan ultra nasionalis bayangan, kelompok sekuler garis keras, yang dikenal sebagai Ergenekon, yang dituduh berusaha merencanakan satu kudeta terhadap pemerintah.

Lusinan orang ditahan sebelumnya karena dituduh punya hubungan dengan kudeta itu termasuk dua perwira militer yang sudah pensiun. Militer yang berulang kali mengecam pemerintah dan menganggap dirinya pelindung sistem sekuler Turki membantah punya hubungan dengan kelompok itu. Polisi Ankara sedang melakukan operasi-operasi sehubungan dengan perintah kepala kejaksaan Istanbul. Jurubicara polisi di Ankara, Mevlut Amir menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan untuk menghindari adanya kudeta yang sering terjadi di Turki.⁶⁹

⁶⁹ *Dua Mantan Jenderal Turki Ditahan Karena Diduga Terlibat Usaha Kudeta*, (diakses tanggal 3 september 2008); melalui <http://202.134.4.18/arc/2008/7/1/dua-mantan-jenderal-turki-ditahan-karena-diduga-terlibat-usaha-kudeta/>

Jaringan berita NTV mengatakan 24 orang telah ditahan di ibukota Ankara dan kota terbesar Turki Istanbul. Penahanan-penahanan itu dilakukan beberapa jam sebelum pemeriksaan dalam kasus di mana seorang kepala kejaksaan akan berusaha agar AKP yang berkuasa dibubarkan karena kegiatan-kegiatan Islam. Jaksa itu menurut rencana akan membuat pernyataan lisan kepada Pengadilan Konstitusi, satu bagian lain lembaga sekuleris Turki. AKP yang berakar Islam membantah tuduhan-tuduhan jaksa itu, dan mengatakan tuduhan itu bermotif politik. Dipahami bahwa kelompok kejaksaan juga kurang mendukung keberadaan Gul.

Upaya dari kejaksaan Turki untuk menjatuhkan pemerintahan AKP sebenarnya bukanlah hal yang mengherankan karena saat Gul masih mencalonkan diripun, kejaksaan telah secara tegas menyatakan ketidaksimpatikannya kepada Gul yang pada dasarnya adalah seorang muslim. Saat AKP berhasil mendukung Gul untuk menjadi presiden maka kejaksaanpun tetap tidak mendukung pemerintahan tersebut.

Kantor berita Anatolia mengatakan Ketua Kamar Dagang Ankara (ATO) Sinan Aygun dan mantan kepala pasukan para militer, Sener Eryugur, termasuk diantara mereka yang ditahan. Eryugur juga adalah ketua Kemalist Thought Association, nama pendiri Turki modern Mustafa Kemal Ataturk. "Ini adalah orang-orang terkemuka dan memiliki pandangan yang sama dalam kesetiaan mereka pada sekulerisme. Pemerintah ingin mengubah masyarakat pada satu kekuasaan yang menguatirkan," kata Mustafa Ozyurek, seorang anggota senior

parlemen dalam partai oposisi utama CHP kepada NTV. Anatolia memberitakan seorang jenderal pensiun lainnya Hursit Tolon juga ditahan, serta wartawan Mustafa Balbay, wakil surat kabar yang sangat sekuleris Cumhuriyet di Ankara. Media-media Turki mengatakan kantor kejaksaan Istanbul memerintahkan penahanan itu dan polisi juga sedang memeriksa kantor Cumhuriyet di Ankara dan kantor Kemalist Thought Association di Istanbul.⁷⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa meskipun Abdullah Gul telah berusaha melakukan pendekatan persuasif kepada militer dimulai dari sebelum Gul mencalonkan diri sebagai presiden hingga kini telah terpilih sebagai presiden, namun militer terus saja melakukan tekanan terhadap Gul. Militer juga berusaha merenggangkan hubungan antara Abdullah Gul dengan AS melalui media massa misalnya mengekspos banyaknya jumlah tentara yang mati akibat perang di utara Irak. Selain militer, diketahui juga bahwa kejaksaan ikut serta menentang kepemimpinan Gul.

⁷⁰ *Ibid.*